

# **Mengipasi Bara Api**

**Peran perusahaan pertambangan Inggris  
dalam konflik dan pelanggaran HAM**

# Daftar Isi

<b>Pendahuluan.</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>Ringkasan Eksekutif.</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>1. Masa emas industri pertambangan</b> . . . . .	<b>6</b>
1.1 Jaringan Inggris . . . . .	8
1.2 Kerugian di tengah lonjakan harga . . . . .	10
1.3 Proses penambangan: lebih banyak negatif daripada positif . . . . .	11
<b>2. Menyulut konflik dan pelanggaran HAM</b> . . . . .	<b>13</b>
2.1 Kolombia: keuntungan dari rezim yang represif . . . . .	15
2.2 Filipina: garis depan baru . . . . .	17
2.3 Tibet: memetik untung dari pendudukan . . . . .	20
2.4 Uzbekistan: Oxus Gold . . . . .	21
2.5 Bangladesh: Asia Energy. . . . .	22
2.6 Peru: Monterrico Metals . . . . .	23
2.7 Argentina: Xstrata. . . . .	24
<b>3. Vedanta</b> . . . . .	<b>25</b>
3.1 Hak masyarakat India . . . . .	27
3.2 Tambang tembaga Konkola, Zambia . . . . .	27
3.3 Pungutan pajak di Armenia . . . . .	28
<b>4. Anglo American.</b> . . . . .	<b>29</b>
4.1 AngloGold Ashanti . . . . .	30
4.2 Anglo Platinum di Afrika Selatan. . . . .	31
<b>5. RioTinto</b> . . . . .	<b>33</b>

5.1 Tambang Grasberg, Papua Barat .....	34
5.2 Tambang emas Kelian, Indonesia. ....	35
5.3 Panguna, Papua Nugini. ....	36
<b>6. BHP Billiton .....</b>	<b>36</b>
6.1 Ok Tedi, Papua Nugini .....	37
6.2 Proyek Bakuys, Suriname .....	38
6.3 Pertambang Escondida, Chile .....	39
6.4 Pencemaran Mangan, Afrika Selatan .....	39
6.5 Eksplorasi di India .....	40
<b>7. Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>40</b>

# Pendahuluan

Perang merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Perang dapat benar-benar menggerogoti prospek pembangunan suatu negara, menghancurkan sekolah dan rumah sakit dan menyebabkan tanah pertanian tak dapat dimanfaatkan untuk beberapa tahun ke depan. Sebanyak 80% dari 20 negara termiskin di dunia pernah mengalami peperangan dalam 15 tahun terakhir, dan warisan persoalan kemanusiaannya berlangsung lama sesudahnya. Sembilan dari 10 negara dengan angka kematian anak tertinggi tengah mengalami konflik pada tahun-tahun belakangan ini.<sup>1</sup>

Namun tidak semua orang jadi lebih miskin karena perang. Banyak perusahaan menuai keuntungan karena konflik, baik dengan memasok peralatan militer kepada angkatan bersenjata atau menjadi tentara bayaran atas nama negara-negara yang berperang. Sementara yang lainnya menyulut konflik dengan operasi mereka di zona perang, seperti perusahaan-perusahaan minyak di negara yang tengah bergejolak seperti Kolombia dan Irak, atau dengan terus berdagang barang-barang seperti berlian. Yang lain mendapat laba dari mendanai upaya perang.

Laporan ini merupakan bagian dari kampanye War on Want untuk menentang perusahaan-perusahaan yang memperuncing atau mendapatkan laba dari terjadinya perang. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk menelanjangi berbagai cara keterlibatan sektor korporasi dalam konflik, dan untuk mengajak dilakukannya aksi publik yang mendesak perusahaan-perusahaan tersebut agar bertanggung jawab. Kampanye ini melengkapi dukungan War in Want yang telah berjalan lama kepada para mitra di daerah perang: sejumlah lelaki dan perempuan yang paling berani di dunia, yang berada di lini depan perjuangan untuk hak asasi manusia (HAM).

Pada halaman-halaman selanjutnya akan dibahas peran industri pertambangan dalam mempertajam konflik dan pelanggaran HAM di seluruh dunia. Terdapat keterkaitan yang erat antara tambang dan situasi konflik. Dalam sekian banyak kasus konflik muncul ketika kekuatan negara dipakai oleh perusahaan-perusahaan asing untuk menindas penentangan masyarakat terhadap kegiatan tambang, tidak jarang dengan konsekuensi yang brutal.

Laporan ini berfokus pada peran penting yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan Inggris di dalam industri pertambangan internasional. Tiga perusahaan pertambangan internasional terbesar seluruhnya berasal dari Inggris, dan bersama-sama dengan perusahaan Inggris lainnya, mereka terlibat di dalam sejumlah situasi konflik di seluruh dunia. Akan tetapi pemerintah Inggris telah gagal untuk bertindak menyikapi peran dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam memperburuk situasi konflik, dan bahkan mendukung operasi mereka meskipun menimbulkan kerusakan akibat keberadaan mereka. War in Want mendesak pemerintah Inggris untuk bertindak agar perusahaan-perusahaan Inggris bertanggung jawab atas peran mereka dalam memperparah konflik dan pelanggaran HAM di seluruh dunia.

# Ringkasan Eksekutif

Industri pertambangan global menikmati suatu periode emas, dengan banyaknya perusahaan yang membukukan laba sebagai akibat dari melambungnya harga beberapa komoditi. Prestasi Inggris sangat baik: tiga perusahaan tambang terbesar di dunia seluruhnya berasal dari Inggris, sementara London menyediakan dana cukup besar untuk industri tersebut serta menjadi tuan rumah sebagian besar perdagangan logam global. Pemerintah Inggris secara konsisten membela kepentingan perusahaan pertambangan Inggris di seluruh dunia.

Pada sisi lain, banyak negara berkembang merasakan segi negatif dari pertambangan. Kelompok bersenjata seringkali memperkaya diri mereka dengan penggalian bahan mineral, melakukan kerjasama dengan perusahaan dan menggunakan pendapatan mereka untuk membiayai perang sipil. Pelanggaran HAM terjadi ketika kesatuan keamanan yang dibayar untuk melindungi harta milik pertambangan menyerang komunitas lokal dan para aktivis anti tambang. Sekarang ini, ada pola yang sama dari satu negara ke negara lainnya dimana penduduk lokal dipaksa ke luar dari tanah mereka oleh proyek-proyek pertambangan, dan mereka yang melakukan protes telah diintimidasi, dipukuli atau ditembak.

Para praktisi hukum membedakan tiga jenis keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM tersebut. 'Keterlibatan diam' terjadi ketika perusahaan gagal menentang pola yang jelas dari pelanggaran HAM di area tempat mereka beroperasi. 'Keterlibatan yang bermanfaat' berlaku ketika perusahaan adalah pihak yang mengambil manfaat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kekuatan negara – sebagaimana terjadi pada banyak kasus yang digambarkan dalam laporan ini. 'Keterlibatan langsung' terjadi ketika perusahaan memberi bantuan kepada pihak yang kemudian melakukan pelanggaran HAM.

Di negara seperti Kolombia dan Filipina, para aktivis anti tambang serta komunitas lokal terus menghadapi ancaman dari kekuatan militer dan paramiliter. Di kedua negara itu, para pemrotes dibunuh karena menentang aktivitas perusahaan tambang. Namun perusahaan-perusahaan Inggris terus beroperasi di daerah konflik, seringkali memperoleh keuntungan dari intimidasi yang dilakukan oleh kelompok keamanan bersenjata.

Di India, masyarakat adat berusaha mempertahankan tanah dan mata pencaharian mereka dari ancaman operasi perusahaan pertambangan Inggris seperti Vedanta. Pemerintah Norwegia kini telah menarik investasinya dari Vedanta sebagai tanda keprihatinan mereka terhadap operasi pertambangan itu di India. Menurut Dewan Etik yang menjadi penasihat untuk dana pensiun pemerintah, Vedanta "tampaknya kurang punya kepedulian dan niat untuk mengatasi kerusakan yang parah dan permanen terhadap penduduk dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka".

Komunitas lokal menghadapi ancaman serupa akibat operasi perusahaan pertambangan Inggris di negara-negara di seluruh penjuru Afrika, Amerika Latin, Asia dan negara-negara kepulauan Pasifik. Perusahaan-perusahaan Inggris telah bermitra dengan rezim-rezim

represif di Tibet dan Uzbekistan, sementara sejumlah protes terhadap aktivitas perusahaan pertambangan Inggris di negara seperti Bangladesh, Peru, Argentina, Afrika Selatan, Indonesia dan Papua Nugini dibalas dengan pelanggaran HAM dalam berbagai tingkatan.

War on Want yakin bahwa pemerintah Inggris harus sadar akan kerugian yang diderita komunitas lokal di negara berkembang sebagai akibat dari kegiatan pertambangan perusahaan Inggris. Mengandalkan kode etik yang bersifat sukarela dan mengatur diri sendiri untuk mengontrol industri penggalian tambang telah terbukti tidak efektif, dan pemerintah kini harus mengambil tindakan untuk menjadikan perusahaan tambang bertanggung gugat secara nasional maupun global. War on Want mendesak pemerintah Inggris untuk memperkenalkan hak-hak baru tentang pemberian ganti rugi yang baru di Inggris dan mendukung standar yang mengikat untuk akuntabilitas/tanggung gugat korporasi di tingkat internasional. Hanya dengan tindakan tersebut kita akan dapat mengatasi keterlibatan korporasi dalam konflik dan pelanggaran HAM.

## I. Masa emas industri pertambangan

*“Tingginya harga komoditas secara khusus berarti waktu yang sangat mengesankan dan tidak terkecuali dengan periode saat ini.”*

*Leigh Clifford, mantan Kepala Eksekutif, Rio Tinto<sup>1</sup>*

Inilah masa emas bagi perusahaan pertambangan dunia, dengan kenaikan harga komoditi primer pada beberapa tahun belakangan. BHP Billiton menyatakan bahwa di tahun 2006 terdapat kenaikan rata-rata tahunan yang nyata untuk komoditas tembaga, timah, bijih besi, batubara metalurgis (*coking coal*), batubara termal, minyak mentah, gas alam dan uranium yang seluruhnya mencapai tingkat harga tertinggi sejak tahun 1970-an, dengan Cina sebagai pendorong utama permintaan.<sup>3</sup> Anglo American menyatakan bahwa harga emas di tahun 2006 adalah 31% lebih tinggi dari pada tahun 2005, dan bahwa harga itu mengalami kenaikan selama enam tahun berturut-turut – suatu kecenderungan kenaikan yang tak pernah terjadi sejak deregulasi pasar emas di tahun 1971. Harga platina adalah 28% lebih tinggi dan harga nikel lebih tinggi 59% di tahun 2006.<sup>4</sup>

Melambungnya harga komoditi tersebut telah membukukan keuntungan yang tidak tertandingi kepada beberapa perusahaan pertambangan. Rio Tinto menyatakan bahwa penyebab utama melonjaknya keuntungan perusahaan di tahun 2006 adalah “efek dari pergerakan harga pada seluruh komoditas utama”, yang menaikkan pendapatan sebesar US\$3 milyar.<sup>5</sup> Keuntungan keseluruhan industri pertambangan pada tahun 2005 telah lebih dari delapan kali lipat lebih tinggi daripada keuntungan tahun 2002, menurut sebuah studi oleh PricewaterhouseCoopers yang berjudul *Mine: Let the good times roll* (Biarkan masa yang baik ini bergulir). Ke 40 perusahaan yang dianalisis dalam penelitian tersebut mencatat keuntungan bersih sebesar US\$45 milyar pada tahun 2005, “tahun yang spektakuler bagi industri pertambangan global”. Kenaikan yang terjadi begitu tinggi sehingga keuntungan bersih BHP Billiton dan Rio Tinto di tahun 2005 saja adalah lebih besar dari keuntungan seluruh 40 perusahaan urutan teratas di tahun 2002.<sup>6</sup>

**Tabel I: keuntungan beberapa perusahaan pertambangan Inggris<sup>7</sup>**

<b>Perusahaan</b>	<b>Keuntungan 2006</b>	<b>Keuntungan 2005</b>
Anglo American	US\$ 5,5 milyar	US\$ 3,7 milyar
Rio Tinto	US\$ 7,4 milyar	US\$ 5,2 milyar
BHP Billiton	US\$ 10,5 milyar	US\$ 6,3 milyar
Xstrata	US\$ 4,9 milyar	US\$ 2,2 milyar
Vedanta	US\$ 934 juta	US\$ 374 juta
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 29,2 milyar</b>	<b>US\$ 17,8 milyar</b>

Memperoleh laba besar terjadi bukan hanya karena naiknya harga komoditas, namun karena penyusunan kembali hukum pertambangan nasional yang menawarkan kepada korporasi asing iklim investasi yang jauh lebih menarik. Selama lebih dari 15 tahun terakhir, lusinan pemerintahan negara berkembang telah menurunkan pajak dan royalti perusahaan, menawarkan insentif kepada para investor asing dan melakukan privatisasi perusahaan pertambangan milik negara. Membuat suatu kebijakan agar menarik bagi investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) telah menjadi elemen standar yang terdapat dalam 'nasihat' dari Bank Dunia, IMF serta donor lain kepada negara berkembang, sedangkan permasalahan yang terkait dengan kebijakan tersebut tidak menjadi perhatian.

Filipina, misalnya, mengadopsi Undang-undang Pertambangan di tahun 1995 yang menyatakan bahwa 40% area tanah negara terbuka bagi pertambangan swasta, memperbolehkan kepemilikan asing 100% bagi perusahaan pertambangan dan menjamin arus kapital, laba dan peralatan keluar dari negara disamping menurunkan pajak dan royalti dan menerapkan pemotongan pajak sementara kepada perusahaan. Terdapat bukti bahwa hukum dibuat berdasarkan perintah perusahaan dan Bank Dunia serta badan internasional lainnya.<sup>8</sup>

Sama halnya. Zambia menetapkan peraturan untuk menarik investasi asing di bidang pertambangan. Tarif royalti mineral bagi investor baru hanya sebesar 0,6% sedangkan royalti rata-rata dunia sebesar 3%. Perusahaan asing dibebaskan dari beban bea cukai terhadap mesin dan perlengkapan dan juga bahan-bahan mentah, yang pada beberapa kasus berlaku hingga 20 tahun, dan tidak ada pembatasan besaran keuntungan dan deviden yang dapat dikirim keluar dari Zambia. Layanan berita kemanusiaan PBB melaporkan pada bulan Februari 2007 bahwa "Zambia tidak banyak mendapat manfaat dari meningkatnya" harga tembaga, yang tahun lalu mencapai sekitar US\$8.000 per ton di London Metals Exchange, naik dari rata-rata US\$1.200 lima tahun yang lalu.<sup>9</sup> Karena tembaga menyumbang 80% perolehan devisa Zambia, negara itu telah mengalami kerugian yang besar sebagai akibat dari lunaknya penerapan pajak negara itu kepada perusahaan.

Memang tidak banyak bukti bahwa strategi tersebut menguntungkan negara berkembang. Badan perdagangan dan pembangunan PBB, UNCTAD, mencatat bahwa US\$15 milyar telah diinvestasikan dalam bidang pertambangan di Afrika pada tahun 2004 sebagai buah dari revisi undang-undang pertambangan. Akan tetapi, menurut UNCTAD, "walaupun program deregulasi sektor pertambangan bisa dianggap berhasil menjaring FDI pada beberapa tahun terakhir, dampak pembangunan yang positif gagal terwujud." Menurut UNCTAD, "beberapa penerima FDI terbesar adalah mereka yang juga mengalami pelarian modal ke luar negeri", termasuk para raksasa sumberdaya alam Nigeria, Angola dan Republik Demokratik Kongo.<sup>10</sup>

## 1.1 Jaringan Inggris

Industri pertambangan dunia jelas-jelas berwajah Inggris. London merupakan ibukota pertambangan dunia, di mana markas besar dari beberapa perusahaan terbesar berkedudukan, di mana proporsi terbesar investasi modal bidang pertambangan dihimpun dan di mana pasar logam paling aktif berada. Tiga perusahaan tambang terbesar di dunia seluruhnya berasal dari Inggris:

- **BHP Billiton** – perusahaan pertambangan terbesar di dunia, didirikan tahun 2001 yang merupakan gabungan dari BHP dan Billiton, dengan markas besarnya berada di London dan Melbourne
- **Anglo American** – perusahaan tambang terbesar ke-dua di dunia, kantor pusat berada di London dengan anggota seperti Anglo Platinum, De Beers dan AngloGold Ashanti<sup>11</sup>
- **Rio Tinto** – perusahaan tambang terbesar ke-tiga di dunia, sekali lagi dengan markas besar berada di London dan Melbourne

Selain mereka, beberapa perusahaan pertambangan utama lainnya yang memiliki hubungan erat dengan Inggris:

- **Xstrata** – perusahaan pertambangan terbesar ke-lima, tercatat di London Stock Exchange dan dengan kantor terdaftar di London, meskipun markas besarnya ada di kota Zug di Swiss
- **Vedanta** – berkantor pusat di London dan sejak tahun 2003 tercatat di London Stock Exchange; dimiliki oleh milyarder asal India, Anil Agarwal
- **Monterrico Metals** – perusahaan tambang yang berkedudukan di London yang beroperasi secara eksklusif di Peru, dan sejak April 2007 menjadi anak perusahaan dari Konsorsium Cina, Zizin
- **Global Coal Management** – beroperasi di Bangladesh dengan nama Asia Energy, dengan investasi lainnya di Afrika Selatan dan Cina
- **South China Resources** dan **Central China Goldfields** – keduanya adalah perusahaan Inggris, bekerja di wilayah pendudukan Cina di Tibet

Pemerintah Inggris mendorong perusahaan-perusahaan tambang tersebut dengan mempromosikan 'iklim investasi yang menarik' di negara-negara berkembang. Memang, membantu perusahaan Inggris mengamankan akses mereka terhadap bahan mentah murah, termasuk mineral dan sumberdaya energi, merupakan tujuan dari kebijakan luar negeri yang telah lama berjalan.<sup>12</sup> Para pejabat Inggris telah secara rutin mendorong kepentingan perusahaan-perusahaan tambang di luar negeri, seperti yang dinyatakan dalam laporan Departemen Luar Negeri 2006/7: "Heads of Mission (para pemimpin misi) di seluruh dunia memakai akses tingkat tinggi mereka untuk membantu para investor Inggris, dan untuk memasarkan pendekatan 'sentuhan ringan' Inggris pada regulasi yang ada." Banyak inisiatif terbaru Inggris untuk mempromosikan iklim investasi yang lebih menarik sebenarnya berupa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pertambangan besar.

Sebagai contoh, pada konferensi pers bersama pada tahun 2005 Pimpinan Anglo American, Sir Mark Moody-Stuart dan Perdana Menteri Inggris saat itu Tony Blair menyatakan komitmen mereka untuk mendukung Investment Climate Facility (ICF) atau Fasilitas Iklim



Investasi yang baru untuk Afrika. Anglo American adalah investor sektor swasta pertama yang berkontribusi kepada ICF, menjanjikan US\$ 2,5 juta; pemerintah Inggris merupakan pemerintahan pertama yang berkontribusi, dengan menjanjikan US\$30 juta selama tiga tahun.<sup>13</sup> Tujuan ICF yang diluncurkan pada pertengahan 2006, adalah “membangun lingkungan untuk reformasi iklim investasi” dan untuk “mendapatkan iklim investasi yang benar” di Afrika.

Dewan penasihat ICF yang beranggotakan sembilan orang termasuk diantaranya sejumlah aktor korporasi pertambangan dengan jaringan Inggris berikut ini:

- Sam Jonah, presiden AngloGold Ashanti, mantan kepala eksekutif Ashanti Goldfields dan kini pimpinan perusahaan pelayanan pertambangan yang tercatat pada bursa saham Johannesburg Stock Exchange
- Baroness Lynda Chalker, mantan Menteri Pembangunan Luar Negeri Inggris, kini menjalankan layanan konsultasi pribadi untuk para investor swasta di Afrika, yang dinamakan Africa Matters Ltd
- Lazarus Zim, mantan pimpinan eksekutif Anglo American Afrika Selatan dan kini adalah pimpinan Kumba Iron Ore, yang punya kaitan dengan Kumba Resources, anak perusahaan Anglo American
- Nkosana Moyo, Managing Partner dari Actis, dana investasi yang disokong oleh Departemen Bantuan Luar Negeri Inggris (DFID), dan sebelumnya ia bekerja untuk Korporasi Keuangan Internasional (IFC) atau sayap Bank Dunia yang mendukung sektor swasta.

DFID telah menguraikan dengan jelas tujuan inisiatif tersebut: “ICF akan membantu mendorong terciptanya kebijakan, undang-undang dan peraturan di seluruh penjuru dunia yang lebih ramah untuk berbisnis”, dan “akan membantu menciptakan dialog yang lebih efektif tentang reformasi iklim investasi antara pemerintah dan komunitas bisnis”. Menurut DFID, ICF “akan mendukung proyek-proyek seperti perampangan regulasi-regulasi bisnis” dan “mereformasi administrasi bea cukai dan pajak serta menghilangkan hambatan untuk berkompetisi”. Anglo American juga punya pendapat yang sama, menyatakan bahwa ICF “akan menjadikan Afrika sebagai sebuah tempat yang lebih menarik untuk berusaha”.<sup>14</sup>

Pemerintah Inggris dan Anglo American juga merupakan pihak-pihak penting di balik Business Action for Africa (BAA), sebuah jaringan internasional yang terdiri dari 100 korporasi dan organisasi bisnis bersama-sama dengan pemerintah pemberi donor dan lembaga keuangan internasional. BAA diluncurkan oleh Tony Blair pada Juli 2005, bersamaan dengan laporan Commission for Africa (Komisi untuk Afrika), yang dipimpin oleh Sir Mark Moody-Stuart dari Anglo American.<sup>15</sup> Para pendukung lainnya antara lain De Beers, British American Tobacco, Unilever dan Shell, serta Rio Tinto dan BHP Billiton yang juga tercatat sebagai anggota. Dalam pidatonya pada pembukaan konferensi, Moody-Stuart menghimbau pemerintah negara-negara Afrika “agar menempatkan prioritas yang lebih untuk menghilangkan hambatan untuk berbisnis dan meningkatkan iklim investasi bagi para investor domestik dan asing”. Situs BAA memuat pernyataan Moody-Stuart : “*Business Action for Africa* semata-mata bekerja demi bisnis.”<sup>16</sup>

Selain melakukan tekanan agar tercipta iklim investasi yang lebih ramah bagi kalangan bisnis, pemerintah Inggris juga mempertahankan pendirian mereka bahwa investor asing perlu mendapatkan hak yang lebih dibandingkan komunitas lokal yang terdampak oleh

proyek-proyek mereka. Salah satu perdebatan besar belakangan ini adalah mengenai sejauhmana komunitas lokal perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek pertambangan, didasarkan atas prinsip yang telah diterima secara internasional yaitu persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC).<sup>17</sup> Namun pemerintah Inggris menyatakan bahwa “pemikiran tentang pemberian hak veto terhadap proyek kepada masyarakat adat atau komunitas lokal bukanlah... suatu hal yang akan kami dukung”. Pemerintah lebih memilih mendukung prinsip “konsultasi awal tanpa paksaan dengan komunitas terdampak untuk mendapatkan persetujuan sebelum proyek desetujui” – yaitu suatu rekomendasi bahwa masyarakat perlu diajak berkonsultasi tetapi tidak membuat mereka kemudian bisa menghentikan proyek.<sup>18</sup>

## 1.2 Kerugian di tengah lonjakan harga

Undang-undang pertambangan baru dengan pengurangan pajak dan royalti korporasi terjadi hampir di mana-mana, penurunan pendapatan negara dialami oleh negara-negara termiskin di dunia sementara peningkatan keuntungan dialami oleh perusahaan pertambangan dan para pemegang saham mereka. Sebagai akibatnya sejumlah negara telah mengalami kerugian signifikan:

- Ketika ekspor emas Tanzania meningkat sejak akhir 1990-an, enam perusahaan pertambangan besar memperoleh keuntungan ekspor keseluruhan sebesar US\$890 juta di tahun 1997-2002 – namun pemerintah Tanzania hanya mendapat US\$87 juta (kurang dari 10%) dalam bentuk pajak dan royalti.<sup>19</sup>
- Di Ghana, perhitungan yang didasarkan pada angka-angka tahun 2003 menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan mengekspor mineral senilai US\$893 juta sedangkan pemerintah hanya menerima pajak sebesar US\$47 juta, atau sekitar 5% dari jumlah ekspor tersebut.<sup>20</sup>
- Zambia hanya memperoleh US\$5 juta dari royalti di tahun 2005 dari ekspor tembaga yang diperkirakan senilai US\$1,6 milyar, demikian menurut sebuah penelitian DFID.<sup>21</sup> Pemerintah Zambia menyatakan pada awal tahun 2007 bahwa mereka hanya menerima US\$71 juta dalam bentuk pajak dari perusahaan pertambangan selama periode lima tahun (2002-6), sedangkan laba perusahaan mencapai US\$652 juta.<sup>22</sup> Perusahaan yang melakukan investasi di tambang-tambang tembaga yang baru saja diprivatisasi nyaris sama sekali tak membayar pajak atau royalti, dan bagian keuntungan yang diperoleh pemerintah dari pertambangan anjlok separuhnya sejak lonjakan harga dimulai di tahun 2002. Meskipun harga tembaga sudah jauh lebih tinggi sejak industri mengalami privatisasi, negara Zambia hanya mendapat seperempat dari apa yang didapatnya ketika pertambangan masih dimiliki oleh negara.<sup>23</sup>

*Laporan Investasi Dunia 2007 UNCTAD*, yang difokuskan pada tantangan yang dihadapi negara berkembang karena minyak, gas dan pertambangan multinasional, mencatat bahwa di banyak negara tersebut di atas, “para pemegang saham telah mengungkapkan ketidakpuasan atas pembagian keuntungan bagi negara penghasil”. Beberapa negara berkembang kini tengah berupaya memulihkan kerugian dengan melakukan negosiasi ulang atas syarat-syarat dimana investor asing mendapatkan keuntungan dari eksploitasi mineral. Menanggapi upaya pemerintah Tanzania untuk menjamin distribusi keuntungan yang lebih

adil, AngloGold Ashanti dilaporkan setuju untuk mulai membayar pajak atas tambang emas raksasa Geita mereka empat tahun lebih awal dari waktu yang sebelumnya telah disepakati melalui skema insentif pengurangan pajak oleh negara. Mengikuti contoh dari negara-negara Amerika Latin seperti Chile, Peru, Bolivia dan Ekuador, pemerintah Zambia, Kongo, Guinea dan Indonesia semuanya dikabarkan tengah mengkaji ulang syarat-syarat lunak yang ditawarkan kepada perusahaan pertambangan asing di masa lalu.<sup>24</sup>

Akan tetapi dalam kasus-kasus dimana sistem seharusnya menjamin pembagian keuntungan yang adil kepada negara berkembang atas sumberdaya nasional mereka, banyak perusahaan menolak untuk membayar kewajiban pajak mereka. Para akuntan yang cerdas bisa membantu perusahaan pertambangan mengurangi nilai keuntungan untuk mengurangi beban pajak, dan industri ekstraktif dikenal biasa mempraktikkan permainan semacam itu. Sebuah studi PricewaterhouseCoopers terhadap 55 perusahaan tambang menemukan bahwa 46 perusahaan membayar tarif pajak efektif lebih rendah daripada tarif menurut undang-undang yang diterapkan di negara tempat markas mereka berada.<sup>25</sup> Penyelidikan mendalam untuk PBB tentang praktik penghindaran pajak di Chile mengungkapkan bahwa antara tahun 1993 dan 2002 perusahaan pertambangan hanya membayar 10% dari keuntungan penjualan mereka dalam bentuk pajak sementara mereka memperoleh lebih dari itu dalam bentuk kredit pajak dari pemerintah; artinya para pembayar pajak Chile membayar kepada perusahaan pertambangan untuk menjalankan usahanya di negara mereka.<sup>26</sup>

### **1.3 Proses penambangan: lebih banyak negatif daripada positif**

Pertambangan skala besar secara teoritis mempunyai sejumlah dampak positif bagi negara berkembang, terutama untuk menghasilkan pemasukan melalui pajak, royalti dan ekspor, menciptakan lapangan kerja serta merangsang pembangunan ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya, potensi keuntungan tersebut kalah oleh dampak negatif dari pertambangan skala besar:

- **Kerusakan lingkungan:** pencemaran air dan udara, dan perusakan lingkungan akibat limbah buangan, adalah hal yang umum terjadi pada operasi pertambangan. Jumlah limbah sangat besar yang seringkali beracun dihasilkan (sebagai contoh, untuk menghasilkan satu ton tembaga akan tercipta 110 ton limbah) dan seringkali dibuang ke aliran sungai. Sekitar 150 kecelakaan lingkungan pertambangan terjadi antara tahun 1983 dan 2002, dimana 15 diantaranya melibatkan sianida.<sup>27</sup> Badan Pelindungan Lingkungan Amerika Serikat mengatakan bahwa kontaminasi air dari pertambangan merupakan salah satu dari tiga ancaman keamanan ekologi di dunia.<sup>28</sup>
- **Hak asasi manusia:** Sebagaimana telah dibahas lebih lengkap pada bagian berikutnya dari laporan ini, operasi pertambangan telah lama dikaitkan dengan pelanggaran HAM paling berat, dimana perusahaan pertambangan dituduh terlibat dalam berbagai tingkat dalam pelanggaran HAM itu. Pertambangan juga bertanggung jawab atas memburuknya konflik yang sudah ada serta menciptakan ketegangan dalam masyarakat.
- **Kesehatan:** Polusi debu dapat menimbulkan penyakit yang parah pada para pekerja tambang, sementara berdirinya kota-kota tambang berkaitan dengan peningkatan

penyebaran HIV/AIDS. Air yang terkontaminasi dari tambang dapat menimbulkan penyakit yang ditularkan melalui air.

- **Kecelakaan industri:** Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa pertambangan telah menyebabkan lebih banyak kecelakaan kerja fatal pada tenaga kerjanya dibandingkan industri lain apapun.<sup>29</sup> Di Cina, 5.900 pekerja tambang batubara kehilangan nyawa mereka di tahun 2005 saja – rata-rata 16 pekerja tewas per hari.<sup>30</sup> Pekerja AngloGold Ashanti yang tewas mencapai 80 orang selama dua setengah tahun hingga Juni 2007; perusahaan besar pertambangan TauTona di Afrika Selatan ditutup pada awal November 2007 setelah terjadi serangkaian kematian pekerja tambang.<sup>31</sup>
- **Perubahan iklim:** Industri pertambangan diyakini mengkonsumsi sejumlah besar (7-10%) produksi energi dunia.<sup>32</sup> Kajian Industri Ekstraktif Bank Dunia mencatat bahwa industri ekstraktif adalah “penyumbang besar” persoalan perubahan iklim.<sup>33</sup> Pemimpin Anglo American Sir Mark Moody-Stuart mengakui bahwa perusahaannya saja memiliki konsumsi energi sebesar yang dikonsumsi negara Finlandia.<sup>34</sup>

Kemiskinan cenderung makin parah di negara-negara yang bergantung kepada penggalian bahan mineral, bahkan Bank Dunia pun mengakui bahwa pertambangan skala besar seringkali memperparah korupsi dan pemerintahan yang buruk.<sup>35</sup> Sebuah studi UNCTAD mengungkap bahwa proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan absolut di negara-negara pengekspor bahan-bahan mineral meningkat dari 61% ke 82% dalam periode tahun 1981-3 hingga tahun 1997-9.<sup>36</sup> Fenomena ‘kutukan sumberdaya’ telah dianalisis cukup baik beberapa tahun belakangan ini, dimana banyak penelitian akademik menunjukkan bahwa semakin negara berkembang tergantung pada eksploitasi mineral, akan semakin lambat tingkat pertumbuhan dari rata-rata pemasukannya. Banyak analisis menyimpulkan bahwa pertambangan skala besar tidak dapat menempatkan negara pada jalur pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Power, profesor ekonomi di Universitas Montana: “Ketika pembangunan sektor mineral berjalan dalam konteks institusi sosial, politik dan ekonomi yang terbelakang, kekayaan sumberdaya yang tidak terbarukan cenderung dihambur-hamburkan, tingkat konflik sosial meningkat dan kerusakan yang nyaris tak dapat diperbaiki membebani lingkungan.”<sup>37</sup> Kondisi seperti itu terdapat di banyak negara yang diuraikan dalam laporan ini.

Bank Dunia adalah penyandang dana utama dari pertambangan skala besar, walaupun analisis mereka terhadap kalangan industri acap kali kritis. Kajian Industri Ekstraktif Bank Dunia, diselesaikan pada akhir 2003, secara umum menyimpulkan: “Meningkatnya investasi tidak lantas berarti menolong si miskin; pada kenyataannya, seringkali lingkungan dan si miskin justru semakin terancam oleh ekspansi sektor usaha ekstraktif di negara tersebut.” Kajian tersebut menguraikan sejumlah dampak merugikan dari operasi industri ekstraktif di tiga negara yang mengalami penyesuaian struktural: Peru, Tanzania dan Indonesia. Diantara dampak tersebut adalah:

- “pendapatan yang menjangkau masyarakat hanya sedikit” sedangkan “pertumbuhan di sektor pertambangan hanya berdampak kecil dalam menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan untuk kaum miskin.”
- “permusuhan dan konflik sosial meningkat... Terdapat pergolakan sosial yang berarti terkait dengan investasi industri ekstraktif.”
- “proses reformasi struktural telah mempertajam ketidakseimbangan makro ekonomi dan meningkatkan kerentanan”. Yang penting, negara-negara tersebut mengalami “turunnya pendapatan pajak” saat investasi pertambangan baru dimulai.<sup>38</sup>

Kenyataannya, pertambangan mempekerjakan sedikit orang, biasanya hanya prosentasi kecil dari angkatan kerja bahkan di negara-negara kaya sumberdaya alam. Seringkali pertambangan skala besar menggusur para penambang kecil, merenggut mata pencaharian mereka. Pertambangan kerap kali meningkatkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan pendapatan, serta menimbulkan ketegangan sosial, dengan membentuk 'koloni tambang' yang kaya raya berdampingan dengan desa-desa yang sangat miskin dan bahkan menjadi semakin miskin karena dampak operasi pertambangan. Sementara seluruh perusahaan multinasional menggembar-gemborkan pengeluaran mereka untuk program-program sosial bagi masyarakat lokal dimana mereka beroperasi, pengeluaran mereka biasanya sedikit, dan sangat kecil dibandingkan keuntungan yang mereka dapat. Di Ghana, misalnya, diperkirakan bahwa proyek-proyek perusahaan pertambangan bagi masyarakat lokal besarnya 0,5% dari nilai mineral yang mereka tambang.<sup>39</sup>

## 2. Menyulut konflik dan pelanggaran HAM

Pertambangan mineral atau bahan mentah oleh perusahaan-perusahaan telah memperuncing konflik di sejumlah negara di dunia. Kelompok bersenjata sering kali memperkaya diri mereka sendiri melalui pertambangan mineral, melakukan kesepakatan dengan perusahaan dan menggunakan keuntungannya untuk membiayai perang. Pelanggaran HAM terjadi dimana tentara atau polisi disewa untuk melindungi aset-aset tambang, khususnya di mana perang sipil berkecamuk. Dalam kasus lain penduduk dipaksa keluar dari tanah mereka oleh proyek pertambangan, dan mereka yang menentang mengalami intimidasi, dipukuli atau ditembak.

Para praktisi hukum HAM membedakan tiga jenis keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM. 'Keterlibatan dalam diam' dilakukan ketika perusahaan gagal menentang pola-pola pelanggaran HAM yang jelas di kawasan mereka beroperasi. 'Keterlibatan dengan mengambil manfaat' berlaku ketika perusahaan adalah pihak yang mengambil manfaat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kekuatan negara – sebagaimana terjadi pada banyak kasus yang digambarkan dalam laporan ini. 'Keterlibatan langsung' terjadi ketika perusahaan memberi bantuan kepada badan yang kemudian melakukan pelanggaran HAM, bahkan apabila perusahaan itu sendiri tidak menghendaki pelanggaran itu terjadi: "sudah cukup apabila korporasi atau agennya tahu akan akibat yang mungkin timbul dari bantuan yang mereka berikan".<sup>40</sup>

Pada tingkat yang lebih tinggi, beberapa studi akademis menunjukkan korelasi kuat antara ketergantungan terhadap sumberdaya alam dan meningkatnya risiko konflik di negara berkembang – inilah aspek lain dari 'kutukan sumberdaya' yang disebutkan di atas:

- Suatu penelitian Bank Dunia menemukan bahwa jika 25% atau lebih dari Produk Domestik Bruto (GDB) diperoleh dari ekspor komoditas primer, risiko perang sipil melonjak menjadi sekitar 30%.<sup>41</sup>

- Studi lain menemukan bahwa negara-negara dengan ketergantungan yang tinggi terhadap komoditi seperti mineral menghadapi risiko perang sipil 40 kali lipat lebih besar daripada negara-negara yang tidak bergantung pada ekspor komoditas primer.<sup>42</sup>
- Sebuah studi di Amerika Serikat mengenai 50 konflik di tahun 2001 mencatat bahwa setidaknya seperempat dari jumlah itu menempatkan faktor pengerukan sumberdaya alam sebagai faktor, juga pemicu konflik atau membantu membiayainya.<sup>43</sup>

Kajian Industri Ekstraktif Bank Dunia menemukan bahwa “biaya ekonomi yang besar yang digerakkan oleh industri ekstraktif bisa mendorong atau memperpanjang konflik sipil. Masyarakat adat khususnya menjadi rentan.” Kajian tersebut juga menyarankan suatu kondisi bagi Bank untuk mendukung proyek pertambangan seharusnya “bebas dari konflik bersenjata atau risiko tinggi memicu konflik”. Disimpulkan bahwa, “dalam keadaan seperti itu” Bank tidak boleh mendukung proyek pertambangan di daerah konflik.<sup>44</sup>

Namun perusahaan pertambangan, termasuk perusahaan-perusahaan Inggris terbesar, tidak hanya tetap aktif di negara-negara yang mengalami konflik; mereka memperdalam kegiatan eksplorasi mereka di banyak negara tersebut. Lebih-lebih, proyek perusahaan pertambangan Inggris memperuncing – dan kadang-kadang menciptakan- konflik-konflik sosial di beberapa negara. DFID telah menyatakan bahwa “negara-negara yang ekonominya tergantung pada sumberdaya alam seperti minyak dan bahan mineral, menghadapi risiko tinggi terjadinya konflik”.<sup>45</sup> Namun hal ini tidak menghentikan dukungan kuat pemerintah Inggris terhadap perusahaan pertambangan Inggris.

Terdapat pula korelasi nyata antara industri ekstraktif dan pelanggaran HAM yang dialami oleh komunitas lokal, sebagaimana diuraikan dalam bab ini serta bab-bab berikutnya. Pada laporan antara di bulan Februari 2006, Profesor John Ruggie, wakil khusus PBB tentang hak asasi manusia dan perusahaan transnasional (TNC), menyampaikan tinjauan menyeluruh atas 65 kasus pelanggaran HAM oleh korporasi, yang ia periksa di 27 negara. Ruggie mencatat: “sektor ekstraktif – minyak, gas dan pertambangan – begitu mendominasi sampel pelanggaran HAM yang dilaporkan, sekitar dua pertiga dari kasus keseluruhan... Industri ekstraktif juga bertanggungjawab atas sebagian besar tuduhan pelanggaran yang paling parah, termasuk keterlibatan dalam kejahatan melawan kemanusiaan. Hal tersebut merupakan ciri khas tindakan yang dilakukan oleh satuan keamanan publik serta swasta yang melindungi aset-aset dan harta milik perusahaan; korupsi besar-besaran; pelanggaran terhadap hak-hak pekerja; dan berbagai pelanggaran terhadap komunitas lokal, khususnya masyarakat adat.” Ruggie menyimpulkan: “sektor bahan galian bersifat unik sebab tidak ada sektor lain yang meninggalkan jejak sosial dan lingkungan yang begitu dahsyat dan merusak.”<sup>46</sup>

Laporan UNCTAD *World Investment Report* tahun 2007 yang berwibawa ini juga memeriksa tantangan tertentu industri ekstraktif bagi perusahaan multinasional. Laporan itu menyoroti ancaman pelanggaran HAM oleh satuan keamanan negara maupun swasta dalam mengamankan aset-aset perusahaan. Sementara UNCTAD mencatat bahwa banyak terdapat laporan pelanggaran yang dilakukan oleh satuan keamanan, termasuk mereka yang mengamankan instalasi pertambangan, laporan itu juga menggarisbawahi keterlibatan korporasi ketika perusahaan mempercayakan satuan keamanan negara untuk melindungi mereka: “Walaupun satuan keamanan negara ini ada di bawah kontrol Negara, perusahaan multinasional tetapi bertanggung jawab atas perilaku mereka ketika korporasi mendukung tindakan satuan keamanan baik dengan membayar gaji mereka atau menyediakan layanan

intelijen dan layanan lain seperti transportasi.”<sup>47</sup> Beberapa contoh yang dipaparkan di bawah ini sesuai dengan gambaran ini.

## 2.1 Kolombia: keuntungan dari rezim yang represif

Kolombia memiliki cadangan sumberdaya mineral yang besar, termasuk cadangan batubara terbesar di Amerika Selatan. Kolombia juga adalah produsen emas dan tambang nikel terbesar ke-dua di benua itu. Pertambangan menyumbang sekitar 14% dari PDB negara, suatu proporsi yang tumbuh setelah Kolombia membuka ekonomi negaranya untuk investasi asing bidang pertambangan. Peraturan pertambangan baru disusun bersama dengan Bank Dunia dan mulai diterapkan tahun 2001, sementara itu, Presiden Alvaro Uribe telah melakukan privatisasi sektor pertambangan negara, menurunkan pajak dan royalti dan menciptakan kondisi investasi yang tergolong paling menarik di dunia.<sup>48</sup>

Rezim pemerintah Kolombia juga merupakan salah satu negara yang paling represif di Amerika Latin, dengan catatan pelanggaran HAM sangat mengerikan. Perang saudara di negara itu telah berlangsung selama 40 tahun, menyebabkan tiga juta orang menjadi pengungsi di dalam negeri dan menelan puluhan ribu nyawa. Angkatan bersenjata Kolombia tidak saja memburu para pemberontak sayap kiri, namun juga para aktivis serikat buruh dan aktivis sosial lainnya yang menuntut distribusi sumberdaya negara yang lebih adil (sekitar 3% pemilik tanah di Kolombia memiliki 70% tanah). Komisi Tinggi HAM PBB telah meminta perhatian atas “pelanggaran HAM yang dilakukan langsung oleh pegawai negeri, khususnya para anggota angkatan bersenjata”, mencatat bahwa “institusi negara lainnya, seperti kantor Kejaksaan Agung, terkait dengan tindakan tersebut atau terlibat di dalamnya.”<sup>49</sup> Kolusi antara satuan-satuan keamanan negara dan kelompok-kelompok milisi liar, yang melakukan sebagian besar pembunuhan dan pelanggaran HAM, telah berlangsung lama.<sup>50</sup>

Kolombia juga punya sejarah panjang organisasi paramiliter (milisi) yang berkaitan dengan para elite lokal bekerja mengusir para petani dan penambang dari tanah mereka dimana perusahaan multinasional menyatakan kepentingannya, dan mengintimidasi mereka yang menentang. Menurut serikat buruh Kolombia, tekad pemerintah untuk menjamin investasi asing membuat angka pembunuhan pada enam tambang menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan di kasus non pertambangan, dan angkanya pun meningkat. Para aktivis serikat buruh menyatakan bahwa antara tahun 1995 dan 2002 terdapat total 6.626 pembunuhan di pertambangan di kotamadya-kotamady Kolombia, dan bahwa 68% pengusiran di negara itu terjadi di area produksi mineral terbesar. Sekitar 42% pelanggaran HAM terhadap aktivis serikat buruh terjadi di sektor pertambangan dan energi.<sup>51</sup> Kolombia benar-benar merupakan negara paling berbahaya di dunia bagi aktivis serikat buruh, dimana 4.000 orang terbunuh selama 15 tahun terakhir – lebih banyak dari total kasus di seluruh negara lain di dunia.<sup>52</sup>

Pemerintah Inggris adalah penyokong utama rezim Kolombia, dan memberikan bantuan militer dan intelijen kepada satuan keamanan, yang bertanggung jawab bukan saja atas pelanggaran HAM namun juga atas terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan Inggris. Perusahaan Inggris telah menginvestasikan lebih dari US\$16

milyar di Kolombia, menurut data Departemen Luar Negeri, dengan sektor kuncinya pertambangan dan minyak.

AngloGold Ashanti secara aktif melakukan eksplorasi di Kolombia sejak tahun 1999. Di wilayah Sur de Bolivar di utara Kolombia, AngloGold Ashanti telah mengambil manfaat dari kebrutalan satuan keamanan negara untuk mengintimidasi masyarakat dan memaksa penduduk hengkang dari tanah mereka untuk membuka jalan bagi operasi pertambangan. Kedahda yang merupakan anak perusahaan AngloGold Ashanti berencana akan mulai beroperasi di pegunungan San Lucas di atas kota Santa Rosa. Kelompok komunitas lokal mengklaim bahwa 2.300 orang telah diusir dari tanah mereka dan bahwa masyarakat telah menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang, perampasan, ancaman, pembakaran rumah serta eksekusi diluar hukum.<sup>53</sup>

Operasi militer dengan pembunuhan dan intimidasi yang dilakukan oleh batalion militer Nueve Granada Kolombia menyapu wilayah tersebut. Pada bulan September 2006, tokoh pertambangan Alejandro Uribe dibunuh setelah memimpin penentangan damai terhadap pertambangan AngloGold Ashanti di wilayah itu dan ia tengah menyelidiki pembunuhan terhadap pemimpin serikat buruh lainnya yang terjadi sebulan sebelumnya. Uribe adalah pemimpin Asosiasi Penambang Bolivar, yang terkait dengan Federasi *Agro-Mining* di Sur de Bolivar (Fedeagromisbol), tetapi militer telah menanamkan kesan bahwa ia adalah seorang gerilyawan dan teroris. Pada bulan Oktober 2006 seorang tokoh masyarakat lainnya, Leider de Jesus Castrillon Sarmiento, juga dibunuh oleh batalion Nueva Granada; kali ini tentara mengaku bahwa pembunuhan terhadapnya adalah “kekeliruan militer”.<sup>54</sup>

Dalam suatu pernyataan yang disampaikan setelah pembunuhan Uribe, Fedeagromisbol mengklaim bahwa pembunuhan terhadap Uribe merupakan “bagian dari pola penyerangan, blokade, ancaman dan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Batalion Nueva Granada yang telah dengan jelas menyatakan bahwa tujuan dari operasi mereka di wilayah itu adalah untuk mengamankan kehadiran perusahaan multinasional tambang emas AngloGold Ashanti (Kedahda S.A) yang telah ditentang oleh para penambang di wilayah itu, termasuk Alejandro Uribe.”<sup>55</sup> Sebagai tanggapan atas laporan War on Want sebelumnya tentang kejadian tersebut, Anglo American menyangkal pernyataan itu sebagai “kabar angin”, meskipun perusahaan mengakui telah menyewa tentara Kolombia untuk melindungi pekerjaan mereka. Dalam pertemuan berikutnya, para wakil Anglo American mengakui bahwa persepsi bahwa AngloGold Ashanti telah mendapat keuntungan dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Kolombia memang “menjadi keprihatinan”.<sup>56</sup>

El Cerrejon, kawasan dengan panjang 30 mil dan lebar tiga mil, di provinsi La Guajira utara Kolombia, adalah pertambangan batubara terbuka paling luas di dunia. Dahulu ia dimiliki oleh pemerintah Kolombia dan Intercor, anak perusahaan multinasional Amerika Serikat Exxon, tetapi sejak awal 2001 konsorsium tiga perusahaan yang terdiri dari Anglo American, BHP Billiton dan perusahaan Swiss Glencore membeli pertama-tama saham pemerintah Kolombia dan kemudian saham Intercor di pertambangan tersebut. Mereka mengambil alih operasinya melalui perusahaan yang bernama Cerrejon Coal Company dan memecah kepemilikannya menjadi tiga. Sejak Glencore ketiga dibeli oleh Xstrata pada bulan Maret 2006, tambang itu kini dimiliki dan dikelola oleh tiga perusahaan yang berbasis di Inggris.



Pada Agustus 2001, tanpa peringatan, bulldoser membongkar-ratakan sebagian besar desa tetangga di lokasi tambang, Tobacco, dimana penduduk diusir dan diserang dengan kekerasan oleh ratusan personil keamanan bersenjata demi membuka jalan bagi perluasan tambang. Penyerangan ini diikuti dengan penyerbuan di bulan Januari 2002, dimana bagian desa yang tersisa dihancurkan. Anglo American dan BHP Billiton bersikukuh menolak bertanggung jawab atas penghancuran Tobacco, dengan dalih konsorsium mereka hanya memiliki 50% tambang saat penyerangan itu terjadi dan bukan mereka yang menjalankan perusahaan. OECD kini tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran atas Panduan mereka untuk Kegiatan Usaha Multinasional dalam kasus tersebut dan upaya-upaya berikutnya untuk memperluas pertambangan.<sup>57</sup>

Saat ini, beberapa komunitas lain menghadapi penggusuran karena ada rencana perluasan tambang. Wakil-wakil komunitas mengatakan bahwa para warga desa sekitar pertambangan mengalami tekanan untuk menjual tanah pertanian mereka dengan harga yang tidak layak, mereka dipaksa setuju dengan ganti rugi perorangan atau tidak mendapatkan apa-apa dan diintimidasi jika mereka bertahan untuk bernegosiasi secara kolektif. Sintracarbon, serikat nasional pekerja industri batubara, mengatakan bahwa “komunitas ini telah dikepung secara sistematis oleh perusahaan Cerrejon”.<sup>58</sup>

Tambang terus mengandalkan satuan keamanan Kolombia dan kelompok-kelompok keamanan swasta untuk mempertahankan operasi mereka, dan penduduk di komunitas itu terus mengalami pelecehan, pencurian ternak dan pengekangan kebebasan bergerak.<sup>59</sup>

Perbandingan antara dampak tambang terhadap komunitas lokal dan kekayaan yang dibawa perusahaan benar-benar menyolok. Walaupun royalti dan pajak dibayar oleh perusahaan tambang, provinsi La Guajira sangat menderita oleh tingginya pengangguran dan gizi buruk, dan tidak ada pasokan air untuk umum yang aman. Warga desa yang tinggal dekat tambang mengatakan bahwa paru-paru mereka dijejali oleh debu batubara yang terus-menerus menerpa mereka, sementara mereka hidup dalam ketakutan akan satuan keamanan yang bekerja untuk perusahaan.<sup>60</sup> Data BHP Billiton menunjukkan bahwa perusahaan memetik laba bersih dari keterlibatan mereka di Cerrejon sebesar US\$73 juta pada paruh kedua 2006 saja; keuntungan untuk tahun itu hingga Juni 2006 adalah US\$97 juta.<sup>61</sup> Pimpinan eksekutif Xstrata Mick Davis menulis dalam laporan tahunan perusahaan 2006: “Cerrejon telah berhasil mengungguli asumsi yang dibuat saat akuisisi dan basis sumberdaya tambang yang luar biasa, ekspansi yang dilakukan saat ini dan potensi bagi pertumbuhan masa depan – bersama dengan naiknya kembali harga batubara thermal – semuanya membuat saya sangat yakin bahwa transaksi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham kita untuk jangka panjang.”<sup>62</sup>

## 2.2 Filipina: garis depan baru

Konflik bersenjata antara tentara pemerintah dan gerilya sayap kiri di Filipina telah meningkatkan militerisasi dan pelanggaran HAM di sekitar instalasi pertambangan. Sebagaimana yang dilaporkan di bulan Januari 2007 oleh tim pencari fakta yang telah mengunjungi negara itu pada musim panas sebelumnya, “militerisasi dan konflik meluas di Filipina dan pelanggaran HAM dilakukan oleh militer, tentara swasta dan kelompok

pemberontak. Pertambangan dalam area konflik ini telah meningkatkan militerisasi secara signifikan dan pelanggaran HAM yang terkait.” Mantan Sekretaris Pembangunan dan Bantuan Internasional Inggris, Clare Short, yang memimpin tim ini, menyatakan bahwa, walaupun ia telah mengunjungi banyak tempat dimana pembangunan yang merusak telah menghancurkan kehidupan rakyat miskin, ”Saya tidak pernah menyaksikan sesuatu yang begitu menghancurkan secara sistematis seperti program pertambangan di Filipina.”<sup>63</sup>

Organisasi-organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa pembunuhan dan ‘penghilangan’ diluar hukum tengah meningkat di Filipina, dimana ratusan orang terbunuh tahun-tahun belakangan ini, yang seringkali dilakukan oleh personel militer yang bertindak dengan kekebalan hukum.<sup>64</sup> Banyak dari mereka yang terbunuh oleh kesatuan keamanan adalah para aktivis yang menentang eksplorasi mineral di wilayah mereka, dan ada kekuatiran bahwa seseorang yang dicap ‘anti tambang’ atas kritik mereka yang bersifat damai dan wajar terhadap proyek pertambangan atau kebijakan pemerintah kemudian menjadi target eksekusi oleh militer. Masyarakat adat khususnya menjadi sasaran.<sup>65</sup>

Berdasarkan Undang-undang Pertambangan 1995, Filipina telah menyatakan bahwa banyak tempat di negara ini yang terbuka bagi pertambangan – sekitar 40% tanah negara terbuka untuk penambangan swasta. Ada 24 proyek yang diketahui menjadi prioritas pemerintah untuk mencari investasi pertambangan, 10 diantaranya berada di Pulau Mindanao. Walaupun ada pembicaraan damai baru-baru ini, konflik antara pemerintah dan kelompok pemberontak seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) tetap mengganggu Mindanao, bersama dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Abu Syyaf dan Jamaah Islamiah. Reporter khusus PBB untuk Hak-hak Masyarakat Adat, Rodolfo Stavenhagen, melaporkan pelanggaran HAM yang meluas oleh tentara di utara Mindanao yang berkaitan dengan tambang dan proyek-proyek pembangunan ekonomi lainnya.<sup>66</sup>

Perusahaan pertambangan telah berencana menginvestasikan ratusan juta dolar untuk eksplorasi di Filipina, terutama di Mindanao, yang mengandung sejumlah besar kekayaan mineral. Australia, misalnya, baru-baru ini telah menggandakan bantuannya kepada Mindanao sementara lebih dari 12 perusahaan pertambangan Australia beroperasi di sana.<sup>67</sup> Anglo American diberitakan oleh media pertambangan telah “bergabung dengan mereka yang berduyun-duyun ingin menemukan tambang baru di Filipina” dan tengah menunggu keputusan 12 pengajuan ijin eksplorasi di negara itu, tujuh di antaranya berada di Mindanao.<sup>68</sup> Ketujuh pengajuan tersebut adalah untuk proyek-proyek di wilayah Caraga di timur-laut Mindanao, di mana BHP Billiton juga aktif di sana. Di kawasan itulah marak terjadi pembunuhan politik terhadap aktivis anti tambang. Pada akhir tahun 2006 media lokal melaporkan pembunuhan ke-15 terhadap aktivis pembela hak-hak masyarakat adat yang berkampanye menentang pertambangan destruktif dan penebangan hutan di wilayah tersebut – itu merupakan pembunuhan yang ke-35 di Mindanao secara keseluruhan.<sup>69</sup>

<b>Proyek-proyek eksplorasi perusahaan Inggris di Mindanao</b>		
<b>Perusahaan</b>	<b>Proyek</b>	<b>Lokasi</b>

BHPBilliton	Proyek nikel ATC	Wilayah Caraga
BHPBilliton	Proyek nikel Pujada	Wilayah XI
Xstrata	Proyek tembaga/emas Tampaka	Wilayah XII
Anglo American	Proyek tembaga Boyongan	Wilayah Caraga
Anglo American	Proyek tembaga/emas Bayugo	Wilayah Caraga

Proyek-proyek tambang di Mindanao ini menghadapi penentangan lokal yang besar. Sebagai contoh, proyek Xstrata di Tampakan di bagian selatan pulau mendapat tentangan dari Gereja Katolik setempat. Seorang uskup memperingatkan akan bahaya racun, perampasan mata pencaharian dan bencana lingkungan begitu tambang mulai beroperasi penuh.<sup>70</sup> BHP Billiton terjebak di dalam sengketa melawan komunitas lokal di wilayah Pujada di Mindanao, sebelah tenggara pulau, tentang persoalan proyek eksplorasi nikel (area itu kemungkinan mengandung 150 juta ton bijih nikel). Komunitas Macambol, yang terdiri dari 3.000 orang yang bergantung pada mencari ikan, telah mengorganisir gerakan melawan pertambangan dengan menuntut pemerintah Filipina membatalkan ijin pertambangan. Mereka takut sungai-sungai serta air setempat akan tercemari, dan tambang akan menghancurkan area lokal yang dilindungi dan bahwa mata pencaharian lokal akan hilang.<sup>71</sup> Pemerintah provinsi setempat juga telah menyatakan penentangannya terhadap tambang di wilayah mereka.<sup>72</sup> Terdapat bukti bahwa ijin eksplorasi kepada BHP Billiton yang diberikan pemerintah adalah tidak sah karena tidak semua komunitas perlu memberikan persetujuan mereka berdasarkan hukum pemerintah lokal Filipina belum memberi persetujuan.<sup>73</sup> Namun BHP Biliton tetap melanjutkan proyeknya, yang direncanakan beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Di daerah lain di Filipina juga terjadi penentangan lokal yang besar terhadap proyek pertambangan. Daerah Cordillera mengandung 25% cadangan bijih emas dan 39% bijih tembaga Filipina. Cordillera Exploration Inc, yang merupakan anak perusahaan Anglo American, melakukan eksplorasi di area seluas ribuan hektar di sejumlah wilayah provinsi, dan telah memancing penentangan yang luas dari komunitas lokal. Para pemimpin gerakan penentangan terhadap kehadiran Anglo American meyakini bahwa sikap penentangan mereka terhadap proyek dan kritik mereka terhadap kebijakan pertambangan pemerintah, sudah cukup menjadikan mereka target dari ancaman pembunuhan, dan telah terjadi beberapa pembunuhan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.<sup>74</sup>

Masyarakat dan kelompok-kelompok suku bersama dengan Aliansi Rakyat Cordillera menggugat masuknya Anglo American ke wilayah mereka, yang direstui oleh pemerintah Filipina. Salah satu suku yang menentang kehadiran perusahaan, suku Buaya di provinsi Kalinga, menyatakan bahwa Cordillera Exploration memulai aktivitas pertambangan di wilayah itu di akhir tahun 2005. Suku Buaya menuduh Cordillera Exploration sebagai penyusup ilegal sebab mereka belum memberi persetujuan kepada perusahaan untuk beroperasi di wilayah mereka.<sup>75</sup> Penduduk setempat khawatir dengan hadirnya tambang mereka akan kehilangan tanah pertanian, hutan dan sungai. Mereka juga percaya bahwa "setiap kehadiran proyek yang merusak seperti korporasi tambang, akan memecah belah integritas teritorial mereka dan dalam jangka panjang akan merusak identitas budaya mereka."<sup>76</sup>

Pulau Sibuyan dikenal sebagai Galapagos dari Asia karena ekologinya yang unik. Walaupun mendapat protes dari penduduk pulau itu serta kelompok-kelompok lingkungan, Sibuyan Nickel Development Corp (SNPDC) sedang bersiap-siap memulai eksplorasi nikel di pulau itu. Mitra SNPDC dari Australia, Pelican Resources Limited, menandatangani kesepakatan di bulan September 2007 yang memberi hak kepada BHP Billiton atas 500.000 ton nikel dari proyek itu selama periode lima tahun. Dalam persyaratan perjanjian, BHP Billiton akan mendanai eksplorasi dan memberi program evaluasi pengeboran.<sup>77</sup>

Pada 3 Oktober 2007 sekelompok besar penduduk pulau ambil bagian dalam demonstrasi menentang proyek. Di tengah-tengah demonstrasi salah satu pimpinan demonstrasi, *Councillor* (semacam anggota DPRD) Armin Marin, tertembak mati oleh kepala keamanan SNPDC, yang kemudian didakwa telah melakukan pembunuhan. *Councillor* Marin merupakan tokoh kampanye terkemuka di komunitas, dan kelompok lingkungan telah mengulangi tuntutan mereka agar proyek eksplorasi nikel dihentikan setelah kematian Marin.<sup>78</sup>

## 2.3 Tibet: memetik untung dari pendudukan

Tibet telah diduduki secara tidak sah sejak Cina menginvasi di tahun 1950. Sejak itu rezim penindas yang brutal terus menindas pihak yang berbeda pendapat dan menentang, mereka yang dituduh separatis, secara rutin dipenjara dan ratusan tahanan politik menghuni penjara-penjara Tibet. Dalam pendudukan Cina, orang-orang Tibet telah diingkari hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk memiliki, membangun dan mengontrol penggunaan tanah dan sumberdaya mereka. Dalam situasi seperti tersebut dua perusahaan pertambangan Inggris termasuk dari mereka yang tahun lalu menjadi aktif melakukan pengeboran di Tibet.

Central China Goldfields (CCG), berkedudukan di London, mempunyai dua proyek di Tibet. Proyek tembaga/molybdenum Nimu terletak 120 km sebelah barat ibu kota, Lhasa, merupakan usaha patungan dengan perusahaan Cina yang memulai pengeboran pada April 2007. CCG menggambarkan proyeknya sebagai “rejeke nomplik”. Perusahaan ini juga mengeksplorasi cadangan tembaga, emas dan molybdenum di area De Ming Ding, 60km sebelah timur Lhasa.

Website CCG menyatakan bahwa “adalah tujuan perusahaan untuk bekerja secara harmonis dengan masyarakat lokal di mana mereka beroperasi”, meskipun tidak dikatakan bagaimana hal itu diwujudkan apabila negara tersebut dibawah suatu pendudukan.<sup>79</sup> CCG tercatat di Bursa Saham London dan ketuanya, Nigel Clark, hingga kini adalah direktur pelaksana Kamar Dagang Inggris di Cina. Clark baru-baru ini mengepalai China International Mining Group, yang menganggap dirinya sebagai “asosiasi informal yang mempromosikan kepentingan Barat dalam industri pertambangan di Cina, bekerja bersama kelompok pengkajian perundang-undangan Cina tentang pertambangan dan isu-isu perpajakan yang terkait”.<sup>80</sup>

South China Resources (SCR), yang juga bermarkas di London, tengah mengeksplorasi tembaga di proyek Zhunuo miliknya, juga merupakan usaha patungan dengan perusahaan

Cina. Mereka menggambarkan proyek tersebut sebagai “berlokasi di salah satu garis depan terakhir dari eksplorasi mineral di dunia”; cadangan tembaga di sana bisa mencapai 3-5 juta ton. Perusahaan juga lupa menyebutkan dalam website mereka bahwa Tibet dijajah Cina. Direktur eksekutif SCR yang baru saja ditunjuk, David Tyrwhitt, digambarkan oleh perusahaan “telah menghabiskan 5 tahun terakhir di Tibet untuk mencari peluang bagi proyek-proyek pertambangan berskala global di provinsi itu”.

## 2.4 Uzbekistan: Oxus Gold

Perusahaan Inggris Oxus Gold dan pemerintah Uzbekistan berbagi kepemilikan yang setara pada Amantaytau Goldfields, yang sedang membangun beberapa operasi pertambangan. Menurut Oxus, tambang pertama yang dibangun telah menghasilkan lebih dari 430.000 ounce (1 ounce emas = 31,1034768 gram) emas pada akhir Juni 2007. Direktur Oxus pernah mengatakan bahwa “Potensinya besar,” dan “ini merupakan industri pertambangan dengan biaya paling rendah.”<sup>81</sup> Perusahaan juga melakukan eksplorasi di wilayah Kyzylkum Uzbekistan tengah.

Mitra Oxus, pemerintah Uzbek, adalah salah satu rezim paling represif di Asia. Pada bulan Mei 2005, angkatan bersenjata pemerintah menembaki ratusan pengunjuk rasa tak bersenjata di kota Andijan, dan tak ada seorangpun yang dituntut bertanggung jawab. Sejak pembantaian itu, pemerintah Uzbek telah memberlakukan pengawasan ketat terhadap para wartawan independen, para aktivis HAM dan kelompok masyarakat sipil. Catatan HAM Uzbekistan yang mengerikan terdokumentasikan dengan baik, dan termasuk penyiksaan yang meluas dan pelanggaran semua bentuk perlawanan.<sup>82</sup> Emas merupakan penyumbang devisa terbesar kedua bagi Uzbekistan, dan kemitraan antara Oxus dan pemerintah Uzbek memiliki arti yang tidak kecil bagi rezim yang berkuasa.

Walaupun mengakui kondisi HAM di negara itu, dan fakta bahwa penyiksaan masih terus berlangsung dan menjadi “keprihatinan khusus”, Departemen Luar Negeri tetap mendukung Oxus dalam kemitraannya dengan pemerintah Uzbek. Dewan Perdagangan dan Industri Uzbek-Inggris, yang melibatkan para menteri pemerintah dari Uzbekistan serta para anggota Kamar Dagang dan Investasi Inggris serta Kamar Perniagaan London, bertemu di Tashkent di bulan April 2006 untuk membahas kerjasama dalam bidang pertambangan dan industri lainnya. Kedutaan Besar Uzbek di Inggris mencatat pertemuan itu: “pihak Inggris menyatakan keinginan mereka untuk melakukan ekspansi lebih lanjut dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang minyak dan gas, pertambangan, farmasi, pertanian dan pariwisata.”<sup>83</sup>

Secara pribadi Tony Blair turut campur tangan dalam mendukung Oxus dengan menulis surat kepada presiden negara tetangga Kyrgyzstan, pada bulan Januari 2006, untuk mendukung proyek perusahaan pertambangan emas Jerooy di negara itu. Presiden Kyrgyzstan Bakiyev telah membatalkan ijin Oxus untuk membangun tambang, dengan menyebut operasi perusahaan di negara itu “tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum”, dan secara terbuka menentang keras upaya campur tangan Blair.<sup>84</sup> Oxus yang mendapat dukungan Kementerian Luar Negeri Inggris menjawab dengan pedas bahwa:

“Pembatalan ijin Oxus Gold untuk membangun tambang emas Jerooy telah merusak kredibilitas Kyrgyzstan di mata para investor asing.”<sup>85</sup>

Pemerintah Inggris secara *de facto* adalah pendukung rezim Karimov di Uzbekistan, dan melihatnya sebagai sekutu dalam “perang melawan teror”, dan secara konsisten mengecilkan arti pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Mantan duta besar Inggris di Uzbekistan, Craig Murray, berulang kali menginformasikan kepada Kementerian Luar Negeri tentang catatan HAM dan praktik penyiksaan yang dijalankan pemerintah Uzbek, namun akhirnya ia mengesampingkan keprihatinannya. Murray juga mengungkapkan bahwa agen rahasia Inggris telah bersekongkol dengan otoritas Uzbek dan menghalalkan penyiksaan dalam mengumpulkan informasi.<sup>86</sup>

## 2.5 Bangladesh: Asia Energy

Perusahaan Inggris Global Coal Management (GCM) sedang berupaya membangun pertambangan batubara terbuka di Phulbari Bangladesh, melalui anak perusahaan Asia Energy yang sepenuhnya dimilikinya. Untuk mengeduk kurang lebih 500 juta ton batubara yang diperkirakan terkandung di area tersebut, penerbitan perusahaan itu menyatakan bahwa “kira-kira 40.000 orang, termasuk keluarga yang tinggal di bagian timur kota kecil Phulbari, perlu direlokasi”, di mana sekitar 100 desa akan terdampak.<sup>87</sup> Laporan-laporan lain oleh beberapa kelompok kampanye lokal menyatakan lebih banyak lagi orang yang akan direlokasi. Selama bertahun-tahun pemogokan besar dan sejumlah protes dilakukan terhadap tambang, baik secara lokal maupun di ibu kota Dhaka, yang puncaknya memaksa pemerintah Bangladesh untuk menandatangani perjanjian menanggukkan operasi seluruh perusahaan pada Agustus 2006. t Hal itu setelah terjadi pembunuhan terhadap sedikitnya tiga orang oleh personel penegak hukum yang melakukan penembakan terhadap para pemrotes lokal yang menentang pertambangan yang direncanakan, serta melukai lebih dari 100 orang lainnya. Namun, laporan terkini menunjukkan bahwa GCM masih tetap bersikeras untuk membangun tambang dan bahwa pemerintah sementara Bangladesh yang didukung militer mungkin akan mengizinkan perusahaan untuk melanjutkan operasinya.<sup>88</sup>

GCM telah menyatakan bahwa tidak seorangpun akan dipaksa pindah dan bahwa orang-orang akan diberikan kompensasi penuh dan diberikan alternatif mata pencaharian dan perumahan.<sup>89</sup> Namun beberapa penduduk lokal dilaporkan telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka tanpa ganti rugi apapun.<sup>90</sup> GCM mengklaim bahwa akan ada banyak manfaat bagi komunitas lokal, seperti 2.000 pekerjaan baru dan “transformasi bagian barat laut Bangladesh menjadi kawasan pertambangan dan industri”. Ditegaskan pula bahwa pemerintah Bangladesh akan menerima US\$200 juta dolar setahun dalam bentuk pajak dan royalti, dan bahwa tambang akan mendorong pertumbuhan di wilayah miskin.<sup>91</sup>

Namun demikian, mengingat 75% populasi lokal bergantung pada bidang pertanian, muncul kekhawatiran bahwa penciptaan lapangan pekerjaan yang dijanjikan tidak akan sepadan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Laporan lain menyatakan bahwa semua rumah, sekolah dan lapangan usaha dalam radius 6,5 km<sup>2</sup> dari tambang akan digusur. Banyak penduduk setempat juga takut bahwa puluhanribu penduduk bisa terdampak secara

langsung oleh penimbunan 'sisa' tambang yang mencemari ke dalam sungai-sungai atau lahan di sekitarnya.<sup>92</sup>

Pemerintah Inggris sejak awal menyokong proyek Asia Energy. Inggris telah mendorong pemerintah Bangladesh untuk memulai kembali proyek tersebut, dengan alasan bahwa tambang Phulbari penting untuk memenuhi kebutuhan energi negara itu. Roger Moody, direktur perusahaan konsultan pertambangan Nostromo Research, mencatat bahwa selama kunjungannya ke Dhaka tahun 2006 ia “mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa DFID telah menggunakan tekanan yang besar (bagi saya itu tak lain adalah suatu ancaman) terhadap LSM pembangunan terkenal yang berkedudukan di Bangladesh, untuk mengubah, jika tidak mengakhiri, penolakan mereka terhadap tambang Phulbari. Jika tidak, pendanaan mereka dari pemerintah Inggris akan terganggu”. *The Observer* setelah itu melaporkan bahwa DFID di Bangladesh telah melakukan tekanan terhadap ActionAid di negara itu agar berhenti menentang tambang, klaim tersebut telah dibantah oleh DFID.<sup>93</sup>

## 2.6 Peru: Monterrico Metals

Proyek tembaga Rio Blanco, yang terletak 2.500 meter di atas permukaan laut di daerah perbatasan utara yang terpencil Peru dengan Ekuador, saat dibuka tahun 2008 nanti, diharapkan menjadi tambang tembaga terbesar kedua di Peru. Tambang ini dijalankan oleh Minera Majas, yang dimiliki seluruhnya oleh anak perusahaan Inggris Monterrico Metals, yang ia pun merupakan anak perusahaan dari konsorsium Cina. Zijin sejak April 2007.

Ribuan petani lokal dengan keras menentang eksplorasi tambang dan telah lama mendesak perusahaan untuk menghentikan seluruh kegiatannya. Mereka berpendapat bahwa pertambangan akan mengkontaminasi sungai-sungai di dekat lembah Huancabamba dan merusak cadangan air minum penting dan kegiatan pertanian dimana 120.000 orang menggantungkan kehidupan keseharian mereka.<sup>94</sup> Sebuah referendum lokal diadakan pada bulan September 2007 di tiga provinsi terdampak menghasilkan 95% suara menolak adanya tambang.<sup>95</sup>

Pada bulan Agustus 2005, 4.000 orang berbondong melakukan protes di kamp Rio Blanco. Sekitar 300 aparat kepolisian Peru menggunakan senjata dan gas air mata untuk memukul mundur mereka dan memburu beberapa pemrotes selama berjam-jam hingga ke jalan setapak di hutan. Seorang pemrotes terbunuh dan 40 orang terluka. Bulan berikutnya, ratusan petani mengadakan protes lanjutan selama dua hari.<sup>96</sup>

Menurut Lembaga Ombudsman Peru, perusahaan telah bertindak melanggar hukum karena tidak memperoleh ijin legal yang diperlukan dari para petani setempat dan pemilik tanah untuk melakukan aktivitas eksplorasi. Situasi tersebut berlawanan dengan dikeluarkannya lampu hijau oleh Kementerian Pertambangan dan Energi bagi Monterrico untuk melanjutkan eksplorasi.<sup>97</sup>

Monterrico menyatakan bahwanya perusahaan “berniat melakukan konsultasi dengan masyarakat dan menerapkan pembangunan berkelanjutan” dan bahwa para pemrotes boleh datang pada pertemuan masyarakat untuk mengemukakan pandangan mereka. Tetapi

masyarakat mengemukakan bahwa selama ini tidak ada proses konsultasi yang memadai. Beberapa aktivis mengaku bahwa terlibat dalam konsultasi tersebut adalah sama saja dengan menyerahkan nasib ke tangan mereka. Seorang penggiat konservasi Alejandro Zegarra-Pezo, misalnya, menyatakan bahwa ia telah menjadi target pembunuhan dan bahwa “masih banyak lagi pembunuhan terhadap orang-orang seperti mereka, dibunuh dengan alasan sederhana yaitu menyuarkan penolakan dan demonstrasi menentang eksploitasi pertambangan terbuka di bagian utara Peru”.<sup>98</sup> Pada akhir 2006 dan awal 2007, dilaporkan adanya ancaman pembunuhan dan usaha pembunuhan terhadap para aktivis anti tambang.<sup>99</sup>

Ada pula laporan tentang keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran HAM. Pada bulan Maret 2006, Manajer CSR Monterrico diduga terlibat dalam serangan dengan kekerasan terhadap pemimpin masyarakat yang mengorganisir forum damai tentang pertambangan dan pembangunan berkelanjutan di kota Huancabamba.<sup>100</sup> Perusahaan mengandalkan Kepolisian Peru untuk melindungi perusahaan, khususnya satuan khusus kepolisian yang dinamakan DINOES, dan berimplikasi pada terjadinya pelanggaran HAM.<sup>101</sup>

Ketua Monterrico tak lain dan tidak bukan adalah mantan duta besar Inggris untuk Peru, Richard Ralph. Ia mulai memegang jabatan ini pada bulan Agustus 2006, hanya empat bulan setelah ia meninggalkan jabatan sebagai duta besar – saat-saat dimana ia memberi dukungan kuat kepada proyek Rio Blanco. Di bulan November 2005, ia dilaporkan telah mengatakan bahwa norma-norma industri pertambangan Inggris “adalah yang paling ketat di seluruh dunia”, dan bahwa pemerintah Inggris akan menjamin perlindungan terhadap lingkungan jika proyek Rio Blanco dilanjutkan. Ia juga menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan investasi yang menguntungkan bagi bangsa Peru: “Di pedesaan saya mendengar telah terjadi konflik karena adanya kecurigaan. Jelas ada tempat-tempat di mana orang menaruh kepercayaan terhadap tambang sedangkan di tempat lain tidak. Yang paling penting adalah pertambangan memberi kesempatan kerja.”<sup>103</sup>

## 2.7 Argentina: Xstrata

Xstrata adalah perusahaan pertambangan terbesar kelima di dunia menurut kapitalisasi pasarnya, dengan kantornya yang terdaftar di London dan tercatat di London Stock Exchange. Perusahaan mendapatkan perhatian dari media di tahun 2006 ketika pimpinan eksekutifnya, Mick Davis, terdaftar sebagai eksekutif dengan gaji paling tinggi di Inggris, mengantongi hampir £15 juta pada tahun sebelumnya.<sup>104</sup>

Penolakan masyarakat lokal terhadap tiga proyek Xstrata lainnya disebutkan di bagian lain dari tulisan ini: di Tampakan, Mindanao; di tambang El Cerrejon Kolombia; dan di kompleks Bushveld di Afrika Selatan, bersama dengan Anglo Platinum. Xstrata juga menghadapi kampanye penolakan rencana pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Cuervo di selatan Chile, yang bisa mengancam kehancuran area hutan rimba yang masih asli.<sup>105</sup>

Xstrata telah lama dituduh mencemari tanah, air dan udara di sekitar pertambangan tembaga dan emas Alumbreira di barat-laut Argentina – yang terbesar di negara itu. Xstrata, yang memiliki 50% kendali kepentingan di perusahaan yang mengoperasikan



tambang, dilaporkan memperoleh pendapatan sebelum pajak sebesar US\$915 juta di tahun 2006 dari Alumbraera, dua kali lebih besar dari angka tahun 2005 sebesar US\$432 juta.<sup>106</sup> Berbagai tumpahan air yang terkontaminasi terjadi pada beberapa tahun belakangan ini, diduga keras telah meracuni cadangan air setempat.<sup>107</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Argentina juga menyatakan bahwa sistem pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas tambang di wilayah Argentina ini tidaklah memadai untuk menjamin bahwa korporasi akan mematuhi standar lingkungan.<sup>108</sup>

Pada bulan Oktober 2006, masyarakat yang melakukan protes dengan damai di luar gedung di mana sedang berlangsung konferensi internasional antara para pejabat pemerintah dan wakil perusahaan pertambangan di kota Andalgalá telah menjadi sasaran penyerangan oleh polisi setempat, meliputi pemukulan, gas air mata dan peluru karet. Seorang anggota kongres Argentina juga terluka oleh penyerangan polisi, dan mengajukan keberatan secara formal terhadap jaksa penuntut setempat.<sup>109</sup> Pada pertemuan di kota yang sama pada tahun sebelumnya, koalisi masyarakat terdampak tambang telah menerbitkan deklarasi penolakan terhadap pertambangan skala besar seperti Alumbraera, menuntut otoritas negara untuk melakukan “penghentian segera operasi seluruh pertambangan skala besar yang sedang berjalan, tanpa memandang tahapan operasi; dan menunda ijin baru, konsesi dan klaim yang dikeluarkan dibawah aturan hukum saat ini”.<sup>110</sup>

### 3. Vedanta

*“Kelompok ini bertekad mengelola bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Manajemen lingkungan, tenaga kerja, kesehatan dan keamanan serta isu-isu kemasyarakatan yang berkenaan dengan operasi kami adalah hal utama untuk keberhasilan usaha kami.”<sup>111</sup>*

Vedanta Resources plc bermarkas di London, tercatat dalam London Stock Exchange dan dimiliki oleh milyarder India Anil Agarwal, yang menduduki posisi ke 42 Daftar Orang Kaya 2007 menurut media *Sunday Times*. Dengan operasi utama berada di India serta aktivitas tambahan berada di Zambia, Armenia dan Australia, Vedanta menikmati pemasukan sebesar US\$6,5 milyar dari awal tahun hingga Maret 2007. Perusahaan juga menikmati koneksi yang baik dengan pemerintah India maupun Inggris: dewan direktur pertama Vedanta terdiri dari mantan *High Commissioner* (setingkat dutabesar) Inggris untuk India dan beberapa tokoh senior didalam pemerintahan India, termasuk menteri keuangan India saat ini, P Chidambaram.<sup>112</sup>

#### 3.1 Hak masyarakat di India

Perluasan sektor pertambangan oleh pemerintah India telah memancing penentangan umum yang luas, khususnya diantara kelompok suku-suku yang dipaksa pergi dari tanah mereka atau terancam oleh pengusiran. Negara bagian Orissa kaya akan aset-aset mineral dan saat ini tengah mengalami berbagai konflik yang seringkali menjadi brutal. Pada bulan Januari 2006 terjadi demonstrasi yang dilakukan suku lokal menentang pembangunan pabrik baja Tata di bagian timur negeri, dimana polisi menembak mati 12 orang demonstran.<sup>113</sup>

Ribuan orang warga suku di distrik Kalahandi di negara bagian Orissa terjebak dalam pergulatan dengan Sterlite Industries (India) Ltd yang merupakan anak perusahaan Vedanta, menentang pertambangan bauksit serta proyek pemurnian aluminium di dekat kota Lanjigarh. Masyarakat setempat khawatir proyek akan menghancurkan ekosistem mereka yang rentan, yaitu hutan pegunungan Niyamgiri, tempat dimana mereka menggantungkan penghidupan dan menambatkan kehidupan spiritual dan kultural mereka yang dalam. Komite Mahkamah Agung yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas situasi tersebut menuduh perusahaan telah mendapatkan ijin lingkungan untuk proyek dengan menyembunyikan bukti-bukti atas dampak yang mungkin menimpa hutan. Komite mencatat bahwa perbukitan Niyamgiri merupakan “suaka margasatwa yang tengah direncanakan, dengan hutan perawan yang lebat, tempat bermukim suku Dongaria Kandha yang terancam dan sumber beberapa mata air sungai/anak sungai”, dan bahwa proyek hanya mendapatkan persetujuan karena menyembunyikan bukti-bukti dan melanggar panduan konservasi hutan.<sup>114</sup>

Vedanta mengaku bahwa proyek hanya mendapat protes kecil, kenyataannya ribuan orang telah ambil bagian dalam demonstrasi dan pertemuan publik, dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan petisi menentang Vedanta. Penentangan ini dilakukan ditengah-tengah iklim ketakutan dan intimidasi, serta meningkatnya tindak kriminal di wilayah itu. Para pemimpin masyarakat menyatakan bahwa gerak-gerik mereka dipantau dengan ketat oleh orang-orang yang mereka sebut ‘orang perusahaan’ sebab mereka tampak memihak kepentingan Vedanta.<sup>115</sup>

Pada bulan Maret 2005 warga desa Borbhata dan Kinari di kaki pegunungan Niyamgiri dipindahkan untuk membuat kilang pemurnian aluminium Vedanta. Mereka yang menolak meninggalkan rumah mereka diancam dan rumah mereka dibuldoser. Komite Mahkamah Agung mendengar bukti bahwa banyak dari mereka yang diusir dipukuli dan “Pejabat Distrik dan para pejabat perusahaan bersekongkol untuk memaksa dan mengancam mereka”. Menurut kesaksian berikut ini, “Atmosfir ketakutan diciptakan melalui para preman bayaran, polisi dan pegawai distrik. Beberapa orang warga suku dianiaya oleh polisi dan para preman. Setelah digusur mereka terus diawasi dan dijaga oleh petugas bersenjata dari Vedanta dan tidak ada orang luar yang boleh menemui mereka. Mereka praktis ditahan seperti pesakitan.”<sup>116</sup>

Vedanta menyangkal temuan ini, dan mengaku bahwa masyarakat yang dipindahkan telah menerima “paket terbaik yang pernah ditawarkan oleh perusahaan manapun”.<sup>117</sup> Namun demikian, tim pencari fakta dari komite Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa paket rehabilitasi “tidak sesuai dengan kepentingan penghidupan yang keberlanjutan dari masyarakat lokal karena tidak diberikan tanah untuk penggembalaan, bercocok tanam dan melakukan kegiatan mata pencaharian lainnya”. Komite selanjutnya merekomendasikan: “Dugaan tentang rehabilitasi yang tidak layak dan pengusiran paksa perlu diperiksa secara hati-hati melalui badan yang tidak memihak dan tidak bias.”<sup>118</sup>

Keputusan akhir dari Mahkamah Agung tentang apakah tambang bisa terus beroperasi diharapkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Sesudah melalui serangkaian dengar pendapat proyek, yang didukung oleh pemerintah pusat maupun negara bagian, telah berhasil mendapat lampu hijau, namun dengan sejumlah persyaratan kondisi lingkungan dan keuangan. Masyarakat menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap keputusan ini, dan menyatakan bahwa suku-suku akan musnah jika tambang dilanjutkan.<sup>119</sup>

Proyek Lanjigarh bukanlah satu-satunya konflik yang dihadapi oleh Vedanta di India. Di Mettur, Tamil Nadu, penduduk telah menuduh anak perusahaan Vedanta, MALCO, telah merampas tanah mereka dan tidak membayar ganti rugi, sementara limbah yang dibuang pabrik aluminium itu telah mencemari tanah pertanian, mengkontaminasi sumber air dan membinasakan binatang. Emisi dari pabrik Vedanta dan stasiun pembangkit listrik tenaga batubara juga telah menyebabkan masalah kesehatan bagi penduduk setempat, dimana banyak dari mereka yang mengeluhkan penyakit pernafasan, kulit dan mata, gangguan pencernaan, sakit pada dada dan tungkai.<sup>120</sup>

Di kompleks peleburan tembaga di kota Tuticorin di negara bagian Tamil Nadu, yang dioperasikan oleh anak perusahaan Vedanta Sterlite, komite pengawasan dari Mahkamah Agung mendapati “gunung” ampas (arang) bijih dan *phosphogypsum* di area yang terbuka terpapar air dan hujan. Namun demikian, Vedanta mengabaikan perintah menyingkirkan sampah berbahaya tersebut, dan di bulan Juli 2005 komite merekomendasikan penutupan unit pabrik tersebut karena ketidakpatuhan.<sup>121</sup> Di bulan Maret 2007 Dewan Pengendali Polusi Negara India juga memerintahkan Vedanta untuk menghentikan kegiatan pembangunan kompleks aluminium yang mereka rencanakan di distrik Jharsuguda di negara bagian Orissa, sebab perusahaan tidak memperoleh ijin lingkungan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.<sup>122</sup>

Satu investigasi non pemerintah tahun 2005 menemukan bahwa sebenarnya seluruh buruh tambang bauksit Vedanta adalah buruh kontrak. Di suatu lokasi, di Mainpat di negara bagian Chhattisgarh, buruh laki-laki hanya mendapatkan 60 rupee (sekitar 80 pence atau Rp13 ribu) untuk mengangkut satu ton bijih bauksit; buruh perempuan bahkan mendapat upah lebih kecil lagi. Para pekerja tinggal di gubuk panggung kecil beratap jerami di atas tambang, tanpa listrik dan air yang mencukupi. Perusahaan dilaporkan tidak menyediakan fasilitas kesehatan, sementara debu yang mengandung silika siang dan malam beterbangan masuk ke pemondokan para pekerja.<sup>123</sup>

## 3.2 Tambang Tembaga Konkola, Zambia

Zambia memiliki sejarah panjang di sektor pertambangan tembaga, yang hingga tahun 1990-an dikendalikan oleh pemerintah Zambia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya dalam laporan ini, perjanjian pembangunan dinegosiasikan dengan perusahaan pertambangan asing melalui tekanan dari IMF dan Bank Dunia yang berarti bahwa negara tidak menerima pembagian yang adil atas kekayaan tembaganya. Zambia juga menderita oleh berbagai persoalan lain yang terkait dengan pertambangan, termasuk “tingginya” angka kecelakaan kerja yang menewaskan setidaknya 71 buruh tambang di negara ini sejak tahun 2005.<sup>124</sup>

Vedanta memiliki 51% saham di Konkola Copperer Mines (KCM), produsen tembaga terbesar Zambia, dan masih terus berupaya meningkatkan kepemilikannya. KCM menjalankan tiga pertambangan, sebuah kilang peleburan, pemurnian dan kilang peluruhan tailing (tailings leach), dan perusahaan telah lama mendapat kritik karena emisi sulfur dioksida yang berasal dari operasinya – tidak saja atas dasar pertimbangan kesehatan dan

lingkungan, namun juga karena dampak negatif emisi terhadap pertanian lokal. Kementerian Pertanian dan Koperasi Zambia juga protes bahwa sedimen dan endapan lumpur yang dihasilkan dari pabrik Nchanga KCM telah membanjiri ladang dan membuat petani tak dapat bercocok tanam yang menyebabkan kerugian puluhan ribu dolar.<sup>125</sup>

Pada bulan November 2006, kebocoran racun dari pabrik Nchanga mencemari sungai-sungai setempat dan mengalir ke jalur air terbesar di Zambia, Sungai Kafue. Penduduk setempat yang minum dari sungai menderita diare, infeksi mata dan iritasi kulit, dan mungkin menghadapi persoalan kesehatan jangka panjang sebagai akibat dari paparan tembaga, kobalt dan mangaan ribuan kali dari tingkat yang direkomendasikan. Menteri Lingkungan dan Sumberdaya Alam menuduh KCM lalai, dengan mengatakan bahwa kebocoran itu “bukan kecelakaan” tapi “akibat kegagalan pemilik tambang saat ini mengimplementasikan Rencana Lingkungan Tambang Nchanga KCM”. Pemeriksaan resmi yang dilakukan pada pertengahan 2006 menunjukkan bahwa KCM gagal melakukan langkah-langkah perbaikan yang telah digariskan dalam rencana lingkungan dan pemerintah telah memberikan KCM tenggat waktu hingga akhir tahun untuk dipatuhi.<sup>126</sup>

Bukan itu saja: KCM bertanggung jawab atas yang ledakan pipa tailing yang mengakibatkan beberapa komunitas terpaksa mengkonsumsi air tercemar selama setahun lebih. Dewan Lingkungan pemerintah Zambia mengatakan bahwa “ini adalah indikasi kuat bahwa manajemen KCM menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang buruk dalam manajemen lingkungan”. Dewan Lingkungan berhak untuk menghukum para direktur KCM sebagai pribadi jika perusahaan terbukti lalai dalam tugas-tugas mereka.<sup>127</sup>

### **3.3 Pungutan pajak di Armenia**

Bekas anak perusahaan Vedanta, Ararat Gold Recovery Company (AGRC), yang mengendalikan tambang emas Zod di timur Armenia, menjadi subyek penyidikan kriminal oleh jaksa penuntut umum pada awal 2007. Bukti mengungkapkan bahwa perusahaan telah membuang limbah tambang lebih sedikit dari yang seharusnya, mengecilkan nilai cadangan bijih emas dari yang sesungguhnya, menambang melebihi apa yang direncanakan dan mengurangi jumlah bijih yang digali dalam laporannya. Inspektorat Ekologi Kementerian Lingkungan Armenia mendenda AGRC di tahun 2004 karena tidak melaporkan 900 kg emas untuk menghindari pajak jutaan dolar; apa yang terjadi sesudahnya adalah penyelesaian diluar hukum dimana Vendata membayar denda US\$500.000. Pada tahun 2005, Inspektorat menyatakan telah mengungkap lagi penggelapan 1,3 ton emas. Media pertambangan telah melaporkan bahwa jumlah tersebut “merugikan pemerintah serta anggaran pajaknya”. Dalam temuan tahun 2005, AGRC juga kedapatan bersalah atas pelanggaran serius terhadap peraturan keselamatan, yang mengakibatkan lima pekerja tewas baru-baru ini. Beberapa tahun sebelumnya, perusahaan memecat ratusan pekerja setelah mereka menuntut kondisi kerja yang lebih aman dan gaji yang lebih tinggi.<sup>128</sup>

## STOP PRESS

Pada tanggal 7 November 2007, pemerintah Norwegia mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan Vedanta dari dana pensiun global negeri tersebut karena “risiko yang tak dapat diterima atas kontribusi perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang parah serta pelanggaran HAM yang serius atau sistematis”. Dewan Etik yang memberi saran kepada Menteri Keuangan Norwegia telah melakukan penilaian internal tentang operasi Vedanta di India, yang berkesimpulan bahwa: “tuduhan yang ditujukan kepada perusahaan berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan keterlibatan dalam pelanggaran HAM, termasuk kekerasan dan pemindahan paksa terhadap warga suku, memang terbukti. Dalam pandangan Dewan Etik, perusahaan tampaknya kurang berminat dan berkemauan untuk mengatasi kerusakan parah yang ditimbulkan oleh kegiatan terhadap penduduk dan lingkungan.” Dana pensiun global pemerintah Norwegia sebelumnya memiliki saham senilai sekitar US\$13 juta di Vedanta, dan menginstruksikan kepada Bank Norwegia untuk menyelesaikan divestasi mereka pada akhir Oktober 2007.

## 4. Anglo American

*“Sejak berdirinya usaha kami hampir 90 tahun yang lalu, kami telah membangun tradisi yang membanggakan yaitu tidak hanya menghasilkan keuntungan yang mengalahkan pasar untuk para pemegang saham, namun juga memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas di negara-negara di mana kami beroperasi.”*

Laporan Anglo American untuk Masyarakat 2006

Anglo American adalah perusahaan pertambangan terbesar kedua di dunia. Sebagai korporasi berbasis di Inggris tercatat di London Stock Exchange, Anglo American beroperasi di 60 negara, sebagian besar terletak di belahan selatan bumi. Kelompok Anglo American terdiri dari antara lain Anglo Platinum (produsen platina terbesar di dunia), De Beers (produsen berlian terbesar di dunia), dan AngloGold Ashanti (salah satu produsen emas terbesar dunia) – meskipun Anglo American berencana untuk mengurangi saham mereka di AngloGold Ashanti dari 42% ke 17% yang berarti bahwa nanti ia tidak lagi termasuk kelompok Anglo American. Perusahaan ini juga memiliki usaha di bidang batubara, logam dasar dan logam mengandung besi, industri mineral dan kertas. Operasi Anglo American secara global memberi keuntungan besar bagi perusahaan: laba bersih mereka naik 76% di tahun 2006, dari US\$ 3,5 milyar pada tahun sebelumnya menjadi US\$6,2 milyar.<sup>129</sup>

Anglo American membanggakan diri bukan hanya atas laba yang dihasilkan serta “keuntungan yang mengalahkan pasar” untuk para pemegang saham, akan catatan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) mereka. Mereka mengaku,

Anglo American telah banyak melakukan ‘prinsip usaha warga yang baik’ dan terlibat dalam berbagai skema CSR secara sukarela: “Sebagai sebuah Kelompok Usaha, kami telah ikut menandatangani sejumlah inisiatif internasional yang, kami percaya, memberi kontribusi besar untuk membangun masa depan yang lebih lestari. Ini mencakup *Global Compact* dan Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative*), Dewan Internasional untuk Tambang dan Logam (*ICMM*) dan Dewan Usaha Dunia untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (*World Business Council for Sustainable Development*).”<sup>130</sup>

Bagi masyarakat yang hidup bersama dampak aktivitas Anglo American, suatu inisiatif sukarela tidak terlalu punya arti. Krisis HAM yang dihadapi lawan Anglo American di Kolombia dan Filipina telah dijelaskan sebelumnya dalam laporan ini. Contoh-contoh dari Afrika berikut ini mempertegas bagaimana komunitas lokal melihat operasi pertambangan Anglo American sebagai ancaman bagi kehidupan mereka, dan seringkali menanggung beban berat karena telah menyuarakan penentangan terhadap aktivitas perusahaan.

## 4.1 AngloGold Ashanti

AngloGold Ashanti beroperasi di enam negara Afrika. Kegiatan pertambangan perusahaan di Ghana telah memberi dampak yang menyengsarakan masyarakat di sekitar tambang emas Obuasi, salah satu tambang yang terbesar di Afrika. Banyak sungai dan sumber air setempat yang sebelumnya digunakan sebagai air minum, mencari ikan dan irigasi tanah pertanian telah tercemar akibat aktivitas tambang. Pencemaran baru juga terjadi di Obuasi akibat ‘danau penampungan sianida’ perusahaan. Penduduk desa menyatakan bahwa setelah hujan lebat di bulan November 2005 perusahaan membuka pipa dari ‘danau penampungan sianida’, membanjiri beberapa rumah dan sebuah sekolah besar di desa Abenpekrom dengan air yang diyakini mengandung sianida dan unsur berbahaya lainnya. AngloGold Ashanti mengaku telah “memberikan kompensasi yang layak” atas tumpahan tersebut, namun berbulan-bulan kemudian setelah kejadian itu warga desa belum juga mendapatkan ganti rugi apapun.<sup>131</sup>

Iklim ketakutan menyelimuti banyak warga desa sekitar pertambangan, dimana polisi dan petugas keamanan perusahaan telah menerapkan cara-cara brutal untuk melindungi kepentingan perusahaan. Penyerangan sering dilakukan di desa untuk mengintimidasi atau melacak para penambang ‘liar’. Telah terjadi beberapa kasus penembakan terhadap para penambang di area konsesi atau kasus meninggalnya mereka setelah mengalami penahanan oleh polisi yang bekerja untuk AngloGold Ashanti, namun rupanya tidak ada kompensasi yang diberikan.<sup>132</sup>

Aksi-aksi semacam itu dikecam keras oleh mantan Komisi Tinggi HAM PBB, Mary Robinson, yang menggambarkan bahwa dirinya “sangat prihatin” atas “seriusnya persoalan HAM yang terus terjadi di sektor ini”. Dalam suatu pernyataan tentang isu HAM di industri pertambangan Ghana, Mary Robinson menyatakan: “Pada beberapa kasus, satuan keamanan yang bekerja di sekitar lokasi pertambangan memakai cara-cara kekerasan untuk memindahkan anggota masyarakat dari area pertambangan. Dalam kasus lainnya, perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan atas sumber air dan tanah merupakan pelanggaran atas hak-hak masyarakat untuk mempertahankan kehidupan yang

berkelanjutan.” Robinson berjanji untuk berbicara langsung dengan AngloGold Ashanti selama kunjungannya di Ghana.<sup>133</sup>

Baru-baru ini tambang emas telah mengambil alih kapas sebagai sumber devisa utama Mali, dan negara ini kini merupakan produsen emas terbesar ke tiga di Afrika. Dua tambang AngloGold Ashanti di Morila dan Sadiola, merupakan penyumbang terbesar produksi emas Mali. Meskipun pertambangan tersebut menghasilkan puluhan juta dolar bagi AngloGold Ashanti beberapa tahun belakangan ini, perusahaan hampir tidak menyumbangkan apa-apa bagi masyarakat di sekitar pertambangan. Jumlah dana yang kecil untuk proyek yang disebut ‘pembangunan komunitas’ sudah termasuk pembayaran untuk para petugas keamanan lokal; memang, pembayaran tertinggi di tahun 2002 dan 2003 di tambang Morila adalah untuk para petugas keamanan.<sup>134</sup>

Pertambangan membawa serta meningkatnya kasus HIV/AIDS, pelanggaran hak pekerja dan, di desa-desa sekitar tambang Sadiola, tingginya tingkat penyakit paru-paru dan keguguran.<sup>135</sup> Tanah diambil-alih dengan kompensasi minimal, mengurangi jumlah tanah yang tersedia untuk bertani dan bertanam kapas. Meskipun pertambangan membuka sejumlah lapangan kerja, wawancara dengan penduduk setempat mengungkapkan bahwa “kehidupan menjadi semakin sulit semenjak tambang beroperasi” dan sebagian besar orang di komunitas lokal “kehidupan secara ekonomi dan fisik kini lebih tidak terjamin dibandingkan kehidupan sebelum era pertambangan dimulai”.<sup>136</sup>

Telah bertahun-tahun Republik Demokratik Kongo (RDK) mengalami perang saudara dan kekerasan dari paramiliter, dengan korban jiwa jutaan orang. Pada tahun 2005, laporan Human Rights Watch menjabarkan bagaimana AngloGold Ashanti telah membangun jaringan dengan “kelompok pembunuh bersenjata” di Kongo untuk beroperasi di wilayah itu. AngloGold Ashanti mengakui bahwa para pegawai mereka telah lebih dari satu kali membayar uang kepada kelompok milisi FNI, namun “menyesalkan” pembayaran tersebut. Sebagai akibatnya, dilakukan sebuah kajian atas kegiatan eksplorasi mereka di Kongo untuk memastikan bahwa “aktivitas dapat dilakukan dengan terhormat, yaitu, dengan memenuhi nilai-nilai perusahaan.”<sup>137</sup> Dua tahun setelah itu, AngloGold Ashanti bukan hanya masih tetap beroperasi di negara ini tetapi malah makin meningkatkan kegiatan mereka. Lebih lanjut, menurut laporan Kelompok Pakar yang disampaikan kepada Sekretaris Dewan PBB di bulan Januari 2007, masih ada korelasi nyata antara eksploitasi sumberdaya alam di Kongo, khususnya emas, dan aktivitas dari “para aktor bersenjata yang melanggar hukum”.<sup>138</sup>

## **4.2 Anglo Platinum di Afrika Selatan**

Anglo Platinum membanggakan hubungan mereka dengan komunitas lokal di area operasi perusahaan mereka. Mereka menarik perhatian khusus atas pendekatan yang dilakukan untuk pemukiman kembali penduduk lokal guna membuka jalan bagi operasi perusahaan: “Dalam melakukan pemukiman kembali, kami bekerja atas dasar persetujuan penduduk dan itu dilakukan hanya bila tidak ada alternatif lain yang realistis.”<sup>139</sup> Namun di Afrika Selatan, komunitas lokal belum pernah diajak berkonsultasi secara semestinya tentang kehadiran perusahaan, dan mereka menghadapi tekanan besar karena melawan perluasan kawasan Anglo American yang melanggar batas lahan penduduk.

Aktivitas Anglo Platinum di Afrika Selatan dipusatkan pada *Bushveld Mineral Complex*, yang mengandung cadangan bijih besi terkaya di dunia. Kompleks itu merupakan tempat berlangsungnya perselisihan antara Anglo Platinum dan masyarakat lokal yang berkepanjangan.<sup>140</sup> Para petani kulit hitam yang miskin dari desa Maandagshoek dekat tambang Anglo Platinum di Modikwa mencoba menghentikan penyerobotan tanah pertanian untuk perluasan tambang. Pada bulan Juni 2006 Anglo Platinum mengirimkan tim pengeboran ke tanah pertanian masyarakat di sekitar tambang Modikwa dan mendapat perlawanan dari ratusan pemrotes. Pada hari berikutnya petugas kepolisian datang kembali untuk menangkap para pemimpin komunitas dan memerintahkan kerumunan untuk bubar. Kerumunan menjadi kacau dan polisi melepaskan beberapa tembakan yang menyebabkan sekitar 20 orang dilarikan ke rumah sakit setempat, delapan diantaranya menderita luka akibat terkena peluru karet dan seorang terluka di tangan oleh peluru tajam.<sup>141</sup>

Masyarakat di sekitar tambang Mokopane Anglo Platinum telah melakukan *class action* ke Pengadilan Tinggi di Pretoria. Anglo Platinum bermaksud memperluas pertambangan, yang akan menyebabkan sekitar 5.000 orang akan kehilangan tanah pertanian dan penggembalaan, tempat mereka secara turun-temurun menggantungkan hidup mereka. Terjadi beberapa kasus pemukulan dan penangkapan anggota masyarakat oleh polisi, yang dituding oleh pengacara warga, Richard Spoor, sebagai “anjing pemburu” perusahaan.<sup>142</sup> Pada bulan November 2006, iring-iringan kendaraan yang terdiri dari 23 orang polisi, satuan pengamanan dan kendaraan perusahaan melintasi desa-desa sebagai unjuk kekuatan yang dipandang masyarakat sebagai aksi intimidasi yang mengingatkan mereka pada era apartheid.<sup>143</sup>

Untuk membuka jalan bagi tambang baru Twickenham milik Anglo Platinum, orang-orang dari berbagai desa berhasil dipaksa keluar dari tanah mereka, seringkali dengan kompensasi yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, dan dipindahkan ke ‘desa baru’ yang dibangun oleh perusahaan di Magobading. Warga desa yang sebelumnya tergantung pada pertanian untuk penghidupan mereka kini tidak punya tanah dan hanya sedikit akses terhadap air dan pembuangan air limbah. Pada Januari 2007, demonstrasi protes masyarakat atas pertambangan menuai pemukulan dari polisi dan penangkapan terhadap 15 orang. Menurut Jubilee South Africa, “Kebrutalan ini bukanlah kejadian yang kebetulan namun adalah pola kekerasan.”<sup>144</sup> Anggota masyarakat terus berdemonstrasi dan telah berkali-kali berupaya membicarakan penderitaan mereka dengan Anglo Platinum, namun pihak perusahaan selalu menolak berhubungan dengan para wakil masyarakat.<sup>145</sup>

## **War on Want dan Anglo American**

Di bulan Agustus 2007 War on Want mempublikasikan 'laporan alternatif' tentang Anglo American, yang merupakan laporan terakhir dari sebuah seri laporan untuk membandingkan retorika ‘tanggungjawab sosial perusahaan’ dengan kenyataan di lapangan. Laporan itu terlebih dulu dikirimkan kepada Anglo American sebelum diterbitkan, dan perusahaan menerbitkan sendiri tanggapan mereka. Kami mempublikasikan tanggapan mereka di situs War on Want bersama-sama dengan laporan asli kami, dan setelah itu menggantikannya dengan tanggapan Anglo American yang baru, yang masih terpampang di situs kami.



Laporan War on Want menyoroti isu-isu HAM yang serius seputar operasi Anglo American, beberapa diantaranya juga ditampilkan pada terbitan ini. Dalam tanggapannya, Anglo American menyatakan bahwa laporan War on Want “tidak akurat atau tidak jujur”, dan berupaya untuk mengabaikan banyak bukti pelanggaran HAM yang diderita masyarakat lokal yang tinggal di sekitar operasi perusahaan. Meskipun diakui bahwa Anglo American dan anak perusahaannya telah membuat kesalahan pada beberapa kasus yang dipaparkan.

War on Want bertemu dengan perwakilan Anglo American dan AngloGold Ashanti pada bulan Oktober 2007. Kami dapat memastikan bahwa isi penemuan laporan asli kami adalah benar adanya, meskipun para wakil perusahaan tetap meragukan beberapa kesaksian anggota masyarakat yang ada dalam laporan itu. Kami juga menyepakati bahwa industri pertambangan tengah menghadapi tantangan nyata mengenai operasi mereka di daerah konflik atau “negara yang rentan”. Publikasi ini bermaksud menunjukkan bagaimana luasnya tantangan yang ada.

## 5. Rio Tinto

*“Dimanapun kami bekerja, kami memiliki komitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas kami dan berupaya memastikan bahwa komunitas lokal mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari keberadaan Rio Tinto sebagai tetangga mereka” Leigh Clifford, Rio Tinto Chief Executive, 2000-07<sup>145</sup>*

Rio Tinto adalah perusahaan tambang terbesar ketiga di dunia menurut kapitalisasi pasar, dengan operasi meliputi batubara, tembaga, berlian, emas, uranium serta mineral lainnya. Perusahaan yang bermarkas di London ini beroperasi di 40 negara dan mempekerjakan sekitar 32.000 karyawan. Rio Tinto merupakan pemasok mineral terbesar di dunia, produsen berlian terbesar ketiga, eksportir bijih besi terbesar nomer dua, serta produsen tembaga terbesar keempat.

Perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Pada tahun 2006, Rio Tinto mencatat keuntungan US\$ 7,4 milyar, sedangkan sebelumnya, di tahun 2005 mencatat keuntungan sebesar US\$ 5,2 milyar. Penyebab utamanya adalah “dampak pergerakan harga pada berbagai komoditas utama”, yang menaikkan penerimaan sebesar US\$3 milyar Rio Tinto menduduki urutan ke 10 sebagai perusahaan yang paling menguntungkan di dunia di tahun 2005, - dari semua sektor - versi majalah Fortune.<sup>148</sup>

Rio Tinto dikenal dengan hubungannya dengan tampuk kekuasaan dan dengan pemerintah Inggris. Beberapa direktur non-eksekutif perusahaan ini adalah mantan duta besar dan pejabat senior Kementerian Luar Negeri, juga beberapa pejabat pemerintah Inggris lainnya. Paul Skinner, pimpinan perusahaan ini, bahkan merupakan anggota Dewan Manajemen Pertahanan atau *Defence Management Board (DMB)* pada Kementerian Pertahanan, yang merupakan sebuah komite tingkat tinggi yang berperan mengimplementasikan strategi dan

kebijakan pertahanan pemerintah Inggris, termasuk “mensukseskan tugas-tugas kemiliteran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.

## 5.1 Tambang Grasberg, Papua Barat

Tambang Grasberg di Papua Barat Indonesia, mungkin merupakan perusahaan tambang yang paling dikritik di dunia belakangan ini, yang menjadi sorotan media terutama di Amerika. Perusahaan tambang ini merupakan patungan antara Rio Tinto dan perusahaan Amerika Serikat Freeport-McMoran, dan menguasai cadangan emas terbesar di dunia dan cadangan tembaga terbesar ke tiga di dunia. Perusahaan ini dilindungi oleh militer dan polisi Indonesia yang terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM yang terekam dengan baik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terutama untuk menekan gerakan Papua Merdeka. Konflik di Papua telah menyebabkan lebih 100.000 orang tewas pada dekade lalu.

Pelanggaran HAM yang serius telah terjadi di sekitar tambang, dan perusahaan telah berulang kali dituduh terlibat dalam penggunaan kekuatan militer dan polisi pada operasi perusahaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Indonesia mencatat bahwa pada pertengahan tahun 1990-an, dalam rangka mengamankan operasi perusahaan, pihak pasukan keamanan Indonesia telah melakukan pembunuhan sewenang-wenang, penganiayaan dan, penghilangan paksa sejumlah penduduk lokal yang menuntut pemisahan diri Papua Barat.<sup>149</sup> Investigasi pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa tambang Grassberg telah membayar militer dan polisi Indonesia sekitar US\$ 20 juta selama lebih dari tujuh tahun terakhir. Komandan pasukan masing-masing menerima puluhan ribu dollar Amerika Serikat, sementara ratusan ribu dollar dibagikan untuk Brimob, pasukan kepolisian yang dikenal memiliki catatan berbagai pelanggaran HAM, seperti halnya pada kasus-kasus yang terjadi selama pendudukan Indonesia di Timor-timur.<sup>150</sup> Pada bulan Februari 2006, pasukan keamanan berusaha mengusir ratusan penduduk lokal yang mendulang emas di sekitar tempat pembuangan limbah (*tailing*) perusahaan, yang menyulut konflik dan berujung pada tertembaknya 3 orang penduduk.<sup>151</sup> Protes yang terus dilancarkan oleh masyarakat seringkali menjadi konflik antara polisi dan masyarakat, baik di sekitar lokasi perusahaan maupun di Jakarta, yang mengundang kecurigaan bahwa kerusuhan sengaja ditimbulkan oleh pihak keamanan yang dibayar oleh perusahaan agar mereka dapat memperoleh manfaat berupa tambahan uang ketika mereka dipanggil untuk membantu mengatasi kerusuhan.<sup>152</sup>

Tambang Grassberg telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, terutama di mana masyarakat adat Kamoro bermukim di bagian hilirnya. Perusahaan tambang ini membuang 230.000 ton limbah per hari, termasuk limbah logam beracun, ke sungai. Selama masa operasi proyek, perusahaan ini akan membuang 3,5 juta ton limbah.<sup>153</sup> Menurut Walhi, organisasi lingkungan hidup terkemuka di Indonesia, perusahaan ini telah membuang satu milyar ton limbah *tailing* ke sistem sungai di sekitarnya, meskipun secara tegas peraturan tentang pengendalian kualitas air di Indonesia melarang pembuangan limbah ke sungai. Ini semua menyebabkan konsentrasi tembaga di sungai-sungai setempat menjadi dua kali lipat dari ambang batas air bersih yang diijinkan.<sup>154</sup> Walhi juga memberikan catatan analisis melalui satelit yang menunjukkan area seluas 35.820 hektare telah tercemar oleh limbah *tailing* perusahaan. Area tersebut hampir setara dengan luas Isle of Wight di Inggris. Sementara itu, area laut yang tercemar sekitar 84.158 hektare.<sup>155</sup>

Penduduk Papua, yang 40% diantaranya hidup dalam kemiskinan, tidak pernah dilibatkan dalam berbagai perjanjian dengan perusahaan dan mendapatkan manfaat yang sangat sedikit dibandingkan dengan hilangnya tanah leluhur mereka serta berbagai pelanggaran HAM yang mereka alami. Dr. Aloysius Renwarin, ketua Elsham di Jayapura, Papua Barat, mengatakan:” Ketika masyarakat melakukan protes maka mereka selalu berhadapan dengan pasukan keamanan (tentara dan polisi) yang disewa oleh perusahaan, dan pelanggaran HAM seringkali terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia di area perusahaan ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyurut, sejak mulai berdirinya hingga saat ini.”<sup>156</sup>

Kondisi masyarakat sangat kontras dengan perusahaan yang memperoleh keuntungan berlimpah. Perusahaan menanggung keuntungan sebesar US\$122 juta dari tambang Grasberg pada tahun 2006, dan US\$232 juta pada tahun sebelumnya.<sup>157</sup> Perusahaan tampak enggan menanggapi secara terbuka berbagai kritik yang ditujukan atas operasi perusahaan mereka, dan seringkali melempar pertanyaan kembali kepada Freeport.<sup>158</sup> padahal kenyataannya, staf kedua perusahaan saling terkait. Leigh Clifford, direktur pelaksana Rio Tinto sejak tahun 2000 sampai 2007 adalah juga direktur Freeport dari tahun 2000 sampai 2004.

## 5.2 Tambang emas Kelian, Indonesia

Rio Tinto menutup pertambangan emas Kelian di propinsi Kalimantan Timur Indonesia pada tahun 2005, setelah 13 tahun beroperasi. Komnasham Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 1990-an penangkapan dan penahanan terhadap masyarakat yang melakukan protes terhadap perusahaan terjadi beberapa kali, dan beberapa staf Kelian telah melakukan perkosaan terhadap anggota masyarakat setempat. Masyarakat lokal juga menuduh bahwa penjaga keamanan perusahaan telah melakukan pemukulan dan penembakan terhadap masyarakat yang melakukan penambangan di area konsesi, dan satuan Brimob kepolisian selalu menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan protes.

Selama pembangunan pertambangan pada tahun 1980-an, lebih dari 440 warga suku Dayak dipaksa meninggalkan tanah mereka dan 4000 orang lainnya menderita karena rusaknya kekayaan alam milik mereka, namun mereka tidak pernah menerima kompensasi yang memadai ataupun perumahan seperti yang dijanjikan oleh Rio Tinto. Sungai Kelian juga tercemari, meniadakan akses komunitas lokal terhadap sumber air bersih untuk minum, mandi dan cuci. Perusahaan juga mengambil alih lahan yang tadinya digunakan oleh penduduk desa setempat untuk pertanian skala kecil. Selama masa operasinya perusahaan membuang 100 juta ton limbah ke lingkungan sekitar, dan sebagian besar merupakan limbah terkontaminasi.<sup>159</sup>

Rio Tinto secara luas mengakui telah terjadi pelanggaran HAM di pertambangan Kelian, tapi mengatakan bahwa setiap tuntutan kompensasi telah diselesaikan dan bahwa perusahaan sedang melakukan rehabilitasi lokasi pertambangan. Namun UNCTAD dalam *World Investment Report 2007* menyebutkan bahwa Kelian merupakan contoh dimana jumlah kompensasi tidak layak, dan masyarakat yang kehilangan tanahnya mengalami kemerosotan penghidupan secara drastis. Rio Tinto, di pihak lain, masih mengambil keuntungan dari pertambangan tersebut. Pembukuan perusahaan mencatat bahwa Kelian memberikan penghasilan US\$13 juta pada tahun 2006.<sup>160</sup>

## 5.3 Panguna, Papua Nugini

Pertambangan tembaga dan emas milik Rio Tinto di Panguna, pulau Bougainville Papua Nugini (PNG), memproduksi 180.000 ton tembaga per tahun, merupakan pertambangan tembaga terbesar ketiga di dunia. Pertambangan ini juga mengeduk 300.000 ton bijih besi dan air setiap hari sejak tahun 1972 sampai ditutup pada tahun 1989 semasa perang antara para pejuang separatis dan angkatan bersenjata pemerintah. Rio Tinto saat ini menghadapi tuntutan hukum oleh masyarakat pulau Bougainville. Tuntutan tersebut menyatakan bahwa Rio Tinto bersekongkol dengan pemerintah PNG untuk menekan penolakan masyarakat atas operasi perusahaan yang merusak lingkungan, yang mengakibatkan ribuan orang meninggal. Tuntutan yang didaftarkan pada tahun 2000 di pengadilan Amerika Serikat tersebut mengklaim bahwa Rio Tinto dan pemerintah PNG telah mengerahkan tentara untuk membuka kembali pertambangan yang telah ditutup oleh masyarakat, dan bahwa Rio Tinto menyediakan angkutan untuk tentara dan memainkan peranan penting dalam pembuatan blokade militer di pulau tersebut, yang berlangsung hampir 10 tahun. Rio Tinto juga dikenai dakwaan membuang limbah batu dan *tailing* secara tidak semestinya, menimbulkan pencemaran kimia dan polusi udara, dan merusak desa serta hutan hujan dalam proses pembangunan pertambangan.

Pada bulan April 2007, pengadilan AS di San Francisco menyatakan bahwa klaim dari masyarakat pulau Bougainville layak didengarkan. Namun demikian, keputusan itu dijangkirbalikkan pada bulan Agustus 2007, dengan memberi kesempatan kepada Rio Tinto untuk melakukan kajian penuh kasus tersebut di pengadilan banding federal AS. Saat ini, ketika industri pertambangan internasional mencari lahan baru, tampaknya pemerintah Papua Nugini akan segera membuka kembali pertambangan di pulau Bougainville.<sup>161</sup>

## 6. BHP Billiton

*“Kami bangga atas prestasi kami dalam tata kelola dan komitmen untuk mengadopsi standar etika yang paling tinggi dimanapun kami melakukan bisnis”*  
Don Argus, Pimpinan, BHP Billiton.<sup>162</sup>

BHP Billiton adalah perusahaan tambang terbesar di dunia, berdasarkan kapitalisasi pasar. Bermarkas di Inggris dan Australia, perusahaan ini merupakan salah satu produsen batubara, tembaga, perak, timah, uranium dan aluminium primer terbesar di dunia. Pada paruh kedua tahun 2006 saja BHP Billiton mencatat keuntungan sebesar US\$ 6.2 milyar; dan pada tahun sebelumnya, dari Juli 2005 sampai Juni 2006 perusahaan ini mengeruk US\$10.5 milyar.<sup>163</sup> Don Argus, pimpinan perusahaan ini, mengatakan “tahun 2006 merupakan tahun yang paling berhasil dalam sejarah BHP Billiton”, dengan keuntungan bagi pemegang saham yang meningkat sebesar 63%.<sup>164</sup> Informasi perusahaan menyatakan bahwa harga komoditas yang menguat telah meningkatkan penghasilan perusahaan sebelum pajak sebesar US\$3.9 milyar (lebih dari sepertiga total penghasilan) pada paruh kedua pertengahan tahun 2006.

Keterlibatan Billiton dengan Anglo American dan Xstrata pada pertambangan batubara El Cerrejon di Kolombia dan aktivitas eksplorasi mereka di Mindanao telah dibicarakan di atas. Bagian ini hanya melihat sejumlah proyek mereka yang ada di Papua Nugini, Chile, Afrika Selatan dan India.

## 6.1 OkTedi, Papua Nugini

BHP Billiton sedang menghadapi tuntutan kerugian sipil sebesar US\$4 milyar oleh warga desa yang tinggal di sekitar sungai Ok Tedi – Papua Nugini (PNG). Tuntutan perkara tersebut telah diajukan atas nama 13.000 warga desa yang menuntut ganti rugi atas kerusakan lahan adat mereka sepanjang sungai yang membentang 38 km. Beberapa ahli mengatakan, dibutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk membersihkan kontaminasi racun di area sekitar pertambangan tembaga Ok Tedi, sebab berton-ton limbah tembaga, timah dan logam berat lainnya telah dibuang ke sungai. Pemerintah Papua Nugini saat ini memiliki 30% saham dari pertambangan tersebut, yaitu sekitar seperempat dari pendapatan ekspor PNG.<sup>165</sup>

BHP Billiton memegang 52% saham di pertambangan Ok Tedi sampai saham tersebut dilepaskan pada tahun 2002, karena adanya bencana lingkungan di sekitar pertambangan. Perusahaan mengklaim bahwa mereka telah menyepakati kompensasi yang adil sebelum mereka meninggalkan proyek tersebut. Akan tetapi warga suku asli yang menandatangani 'perjanjian perpanjangan operasional tambang' dengan BHP Billiton mengatakan bahwa mereka telah ditekan dan dicurangi untuk menandatangani kesepakatan yang hanya memberikan kompensasi kecil untuk kerusakan yang sangat besar.<sup>166</sup>

Dalam *World Investment report* tahun 2007, UNCTAD mengangkat Ok Tedi sebagai contoh mengenai dampak sosial yang disebabkan oleh perusahaan terhadap masyarakat adat di sekitarnya. UNCTAD menjabarkan bahwa kerusakan itu berdampak terhadap kehidupan 50.000 penduduk yang tinggal di hilir sungai di area tambang, yang merusak hampir 2000 km<sup>2</sup> daerah dataran rendah hutan hujan. Belum lagi pencemaran terhadap lahan garapan mereka dan gangguan terhadap aktivitas mencari nafkah dari penduduk. Laporan itu menyebutkan bahwa masyarakat adat menderita berbagai penyakit kronis yang disebabkan oleh polusi, termasuk ruam dan koreng pada kulit.

UNCTAD mencatat bahwa pembangunan pemukiman untuk masyarakat setempat telah gagal mengatasi situasi. Sebuah laporan yang dibuat oleh seorang professor bidang hukum di Universitas Papua Nugini menyatakan bahwa perjanjian BHP Billiton semata-mata "merupakan sebuah cara legal untuk mengurung masyarakat yang terkena dampak agar tidak bisa menuntut secara sendiri-sendiri atas kerusakan lingkungan dan berbagai kerugian dan gangguan yang ditimbulkan... untuk mengendalikan dan memperkecil cakupan tanggungjawab pada jumlah yang mampu ditanggung perusahaan"<sup>167</sup>

## 6.2 Proyek Bakhuis, Suriname

Sebuah anak perusahaan BHP Billiton sudah sejak tahun 2003 melakukan eksplorasi bauksit di pegunungan Bakhuis di bagian barat Suriname. Namun, ijin eksplorasi dikeluarkan oleh pemerintah Suriname tanpa pemberitahuan atau kesepakatan terlebih dulu dengan masyarakat yang terdampak proyek tersebut, yaitu masyarakat adat Lokono, yang secara turun temurun menghuni dan memanfaatkan pegunungan tersebut sebagai sumber penghidupan mereka. BHP Billiton dilaporkan telah gagal menyelenggarakan studi awal mengenai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas eksplorasi yang dilakukan, sementara itu masyarakat Lokono telah terusir dari area eksplorasi, yang merupakan tindakan pelanggaran kebijakan perusahaan dan pelanggaran standar HAM internasional.<sup>168</sup>

Ratusan kilometer jalan telah dibangun atau diperbaiki di area konsesi, yang terdiri dari hutan tropis primer seluas 2.800 km<sup>2</sup>. Sekitar 1000 km jalan setapak telah dibuka agar peralatan pertambangan dapat mencapai area pengeboran, dan sekitar 7000 lubang pengeboran telah dibuat. Pada tahun 2005 BHP Billiton telah meminta maaf atas kegagalan mereka mengkaji dampak dari eksplorasi tersebut, dan mengadopsi kebijakan baru perusahaan mengenai pemangku kepentingan dan pembangunan masyarakat, juga berjanji untuk bekerjasama dengan kelompok konservasi pada area lain yang memiliki cadangan bauksit di Suriname. Meskipun demikian menurut Robert Goodland, yang bekerja sebagai penasihat bidang lingkungan Bank Dunia selama 25 tahun, proyek Bakhuis akan terus menjadi contoh tentang semua kesalahan pertambangan dalam skala besar.<sup>169</sup>

“Proyek pertambangan bauksit di Bakhuis adalah kasus klasik mengenai kekuatan yang tidak berimbang. Proyek pertambangan yang tidak berkelanjutan berhadapan dengan masyarakat tradisional yang hidup berkelanjutan. Perusahaan multinasional yang kaya raya dan kuat akan menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat adat yang lugu, lemah, kebanyakan buta huruf dan miskin. Pada praktiknya seluruh manfaat proyek pertambangan akan mengalir kepada dua pemangku kepentingan, yaitu perusahaan multinasional yang akan memanen komoditas untuk dijual (bauksit) dan pemerintah yang menarik pajak dan royalti. Dua pihak ini akan mendapat manfaat besar tanpa menanggung beban dampak merugikan yang ditimbulkan. Sementara sebaliknya, masyarakat adat akan menanggung semua dampak negatif yang terjadi, dan sedikit sekali, bila ada, manfaat dari proyek pertambangan.”

## 6.3 Pertambangan Escondida, Chile

Salah satu operasi pertambangan terbesar dan paling menguntungkan dari BHP Billiton adalah pertambangan tembaga Escondida di Chile sebelah utara. Dengan 57% saham dimiliki oleh BHP Billiton (dan 30% oleh Rio Tinto), Escondida adalah penghasil tembaga terbesar di dunia, berlokasi di gurun Atacama. BHP Billiton meraup keuntungan bersih US\$1,4 milyar pada paruh kedua tahun 2006 hanya dari pertambangan Escondida. Dalam satu tahun, Juli 2005 – Juni 2006, keuntungan bersih yang dihasilkan adalah sebesar US\$2,6 milyar. Sementara Rio Tinto mendapatkan keuntungan US\$1,25 milyar dari Escondida pada tahun 2006, dan US\$602 juta pada tahun 2005.<sup>170</sup>

Penduduk Chile tidak seberuntung itu. Pada tahun 2007, BHP Billiton dituduh oleh Direktorat Perairan Chile (*the Direccion General de Aguas, DGA*) telah melakukan pelanggaran pengurusan air yang berlebihan (*overextraction*) di Escondida. Petani setempat mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah mengambil air yang terlalu banyak dari sungai Loa, yang merupakan satu-satunya aliran air di Chili bagian utara dan menjadi sumber air bagi daerah tersebut. DGA memerintahkan pemasangan meteran air untuk mengukur air yang dipergunakan oleh proyek pertambangan. Pada bulan Oktober 2007, komisi lingkungan hidup setempat dengan suara bulat menolak permintaan proyek Escondida untuk menambah pasokan air untuk kepentingan proyek pertambangan.<sup>171</sup>

## 6.4 Pencemaran Mangan, Afrika Selatan

Tuntutan hukum lain yang dihadapi oleh BHP Billiton adalah mengenai pembayaran kompensasi kepada pekerja di Afrika Selatan yang kesehatannya diduga terganggu akibat pencemaran mangan. Kasus ini terjadi di pabrik Metalloys di Meyerton, sebelah selatan Johannesburg, yang dikelola oleh anak perusahaan BHP Billiton, Samancor Manganese (60% sahamnya dimiliki oleh BHP Billiton dan 40% oleh Anglo Amerika).

BHP Billiton dilaporkan telah lalai memberikan kompensasi kepada bekas pekerja maupun mengakui bahwa sebagian dari mereka menderita penyakit yang disebabkan oleh keracunan mangan. Padahal diduga Samancor tahu akan insiden keracunan mangan tersebut sejak tahun 1960-an. Perusahaan selalu menepis tuntutan kesehatan para pekerja dan dianggap sebagai “tidak berdasar”, meskipun para anggota komite pensiunan karyawan yang terdiri dari 300 mantan pekerja mengeluh mengalami berbagai gangguan pernafasan serta penyakit lainnya. Komite pekerja mengklaim terdapat 50 orang anggota mereka yang meninggal setelah diPHK, banyak dari kematian tersebut disebabkan oleh penyakit akibat paparan mangan. Sebuah LSM Afrika Selatan, Groundwork, melaporkan bahwa 509 pekerja Samancor yang menjalani tes kesehatan pada tahun 1999, sebagian besar kedapatan menderita keracunan mangan.<sup>172</sup>

Pada saat yang sama, BHP mencatat keuntungan operasi (sebelum pajak) sebesar US\$105 juta pada paruh kedua tahun 2006 dan US\$132 juta dalam kurun satu tahun (Juli 2005 sampai Juni 2006) dari operasi pertambangan mangan, termasuk dari Samancor. Sementara Anglo American mencatat keuntungan sebesar US\$52 juta dari Samancor pada tahun 2006.<sup>173</sup>

## 6.5 Eksplorasi di India

BHP Billiton telah mengajukan permintaan untuk melakukan eksplorasi pada dua lokasi kandungan bauksit di negara bagian Orissa, India. Seperti yang telah dijelaskan di awal laporan ini, masih ada perlawanan sengit terhadap proyek pertambangan baru terutama dari warga suku asli yang khawatir akan terjadi penggusuran, dan persoalan lingkungan yang berupa kerusakan sungai dan hutan. Tim pencari fakta dari Mahkamah Agung India juga menyatakan penolakan terhadap pertambangan baru di Karlapat, salah satu area yang diincar oleh BHP Billiton, yang berada dekat dengan eksplorasi Vedanta di Lanjigarh. Tambang Karlapat diperkirakan memiliki kandungan lebih dari 150 juta ton bauksit.<sup>174</sup>

## 7. Kesimpulan dan Saran

Laporan ini telah menyajikan suatu gambaran luas mengenai konflik-konflik dan krisis hak asasi manusia di mana perusahaan pertambangan Inggris beroperasi di seluruh dunia. Berdasarkan tipologi yang telah dijelaskan dalam bab 2, banyak perusahaan tersebut dapat dikatakan terlibat dalam berbagai krisis yang terjadi karena mereka menarik manfaat langsung dari adanya intimidasi dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat lokal yang menentang aktivitas perusahaan. Dalam kasus dimana perusahaan membayar petugas keamanan swasta atau satuan keamanan pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM terhadap para aktivis anti pertambangan, maka tingkat keterlibatan mereka menjadi semakin besar.

*War on Want* meyakini bahwa untuk menghentikan pelanggaran tersebut, perusahaan-perusahaan itu harus bertanggungjawab atas keterlibatan mereka. Meskipun demikian, bukannya meminta pihak perusahaan bertanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam situasi konflik, pemerintah Inggris justru memberikan dukungan luas ke perusahaan-perusahaan itu di berbagai negara, tanpa mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh masyarakat lokal akibat aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Dukungan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional ini bertentangan dengan kebutuhan masyarakat lokal di negara-negara berkembang. Hal ini dikuatkan lagi oleh dukungan pemerintah Inggris atas pendekatan yang bersifat sukarela yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang secara eksplisit berarti menghindari tanggung jawab yang mengikat secara hukum. Pemerintah Inggris senantiasa membela diterapkannya kode etik secara sukarela bagi dunia industri dan menolak penerapan kerangka regulasi internasional, dengan argumentasi bahwa “hal itu dapat mengalihkan perhatian serta energi dari upaya mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dan terhadap proses-proses hukum lainnya.”<sup>175</sup>

Kegagalan pendekatan ini telah diungkapkan dengan jelas oleh Profesor John Ruggie, wakil khusus PBB untuk hak asasi manusia dan korporasi transnasional, dalam laporannya untuk Dewan HAM PBB pada bulan Februari 2007. Setelah melakukan survei terhadap instrumen-instrumen yang mengenai tanggungjawab perusahaan yang terkandung dalam



peraturan hukum nasional maupun internasional, Ruggie mengungkapkan adanya “kesenjangan yang besar dalam perlindungan terhadap korban” karena komunitas internasional mengandalkan pendekatan kesukarelaan (*voluntary initiative*). Profesor John Ruggie menyimpulkan: “Penyimpangan ini telah menciptakan kondisi yang permisif, dimana tindakan-tindakan perusahaan yang patut dipersalahkan bisa terjadi tanpa adanya sanksi atau pemberian ganti rugi yang memadai. Demi kepentingan korban yang mengalami kekerasan, dan untuk mempertahankan globalisasi sebagai hal yang positif, penyimpangan ini harus diperbaiki”<sup>176</sup>

Organisasi-organisasi HAM dan pembangunan telah selama bertahun-tahun berkampanye untuk penerapan peraturan internasional bagi perusahaan-perusahaan di industri ekstraktif, berkaitan dengan kerusakan yang begitu besar yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal di sekitarnya. Akan tetapi, pemerintah Inggris masih saja menolak ajakan kelompok masyarakat sipil untuk menetapkan peraturan yang mengikat yang dapat menjamin adanya transparansi dan tanggungjawab perusahaan-perusahaan tersebut. Meskipun terdapat kampanye yang gencar terhadap pemerintah untuk mendukung kewajiban pengungkapan pembayaran dari perusahaan minyak, gas dan pertambangan kepada pemerintah tuan rumah, Tony Blair meluncurkan Inisiatif Transparansi Industri yang beretika (*Ethical Industries Transparency Initiative, EITI*) pada tahun 2002 sebagai skema sukarela perusahaan semata. EITI dibanggakan sebagai salah satu inisiatif multi-pemangku yang paling berhasil. Padahal, salah satu analisis terakhir mengungkapkan, bahwa lima tahun sejak dicanangkan, “hingga hari ini tidak tampak ada kemajuan dalam hal mengumumkan pembayaran oleh perusahaan kepada pemerintah berdasarkan skema EITI”<sup>177</sup>.

Perusahaan-perusahaan pertambangan juga menggunakan skema CSR mereka sendiri. Pada tahun 1998, delapan perusahaan pertambangan besar membentuk Prakarsa Tambang Global (*Global Mining Initiative*) yang menjadi embrio dari proyek Tambang, Mineral dan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Mining, Minerals and Sustainable Development*) dan mendorong pembentukan Dewan Internasional untuk Tambang dan Logam (*International Council on Mining and Metals, ICMM*), yang saat ini menjadi proyek CSR induk industri ekstraktif. Anggota ICMM antara lain Anglo American, Rio Tinto, BHP Billiton, Xstrata dan Anglo Gold Ashanti, dengan 10 orang staf yang berkantor di markas besar mereka di London. ICMM sendiri merupakan peserta dalam Prakarsa untuk Jaminan Pertambangan yang Bertanggungjawab (*Initiative for Responsible Mining Assurance* atau IRMA), sebuah inisiatif multi-pemangku yang dibentuk bulan Juli tahun 2006 “untuk membangun dan memantapkan sistem kesukarelaan guna memeriksa secara independen pemenuhan standar lingkungan, sosial dan HAM bagi operasi perusahaan pertambangan”

Dalam menanggapi kritik bertahun-tahun mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh satuan keamanan yang disewa untuk melindungi operasi perusahaan minyak, gas dan pertambangan di seluruh dunia, sebuah inisiatif multi-pemangku (*multi-stakeholder*) yang dipimpin oleh pemerintah Inggris dan Amerika menerbitkan Prinsip-prinsip kesukarelaan mengenai Keamanan dan HAM (*Voluntary Principles on Security and Human Rights*) pada bulan Desember 2000. Beberapa perusahaan pertambangan saat ini terlibat dalam proses Prinsip-prinsip Kesukarelaan tersebut, termasuk Anglo American, AngloGold Ashanti, BHP Billiton dan Rio Tinto. Namun inisiatif tersebut semakin keras dikritik oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil karena gagal menentukan kriteria yang tegas mengenai partisipasi perusahaan. Peserta dari Ornop dalam inisiatif tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya berkaitan dengan kurangnya komitmen dari pemerintah Inggris dalam

mendorong proses lebih lanjut. Pada Pertemuan Tahunan 2007 inisiatif tersebut nyaris bubar sama sekali. <sup>178</sup>

Sementara skema kesukarelaan yang dibentuk semakin banyak, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal tetap terjadi, dan semakin mendalam di daerah 'garis depan' kawasan eksplorasi. Terlebih lagi, beberapa perusahaan secara terus terang mengatakan bahwa CSR bagi mereka pada dasarnya adalah sarana untuk menghalau kritik yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Berbicara di London Business School pada akhir tahun 2006, Pimpinan Rio Tinto, Paul Skinner mengakui bahwa industri pertambangan "tidak selalu memiliki reputasi yang baik berkaitan dengan konservasi sumberdaya alam dunia" dan bahwa perusahaan-perusahaan tambang telah dipandang sebagai "perusak lingkungan" serta "ancaman bagi masyarakat adat setempat". Skinner melanjutkan dengan penjelasan mengenai "alih posisi" perusahaan selama 10 tahun terakhir ini sebagai strategi untuk menghadapi risiko merosotnya reputasi yang mereka hadapi. Pembenaan posisi ini pada gilirannya memperluas akses terhadap sumberdaya alam. Sir Mark Moody-Stuart mengingatkan hal yang sama pada rapat umum tahunan Anglo American tahun 2006 akan pentingnya "manajemen resiko" melalui keterlibatan dalam berbagai inisiatif seperti EITI dan ICMM. <sup>179</sup>

Kecuali dan hanya jika pemerintah Inggris mengakui bahwa kepercayaan terhadap pendekatan 'mengatur diri sendiri dan pendekatan kesukarelaan dalam CSR telah gagal mencegah pelanggaran HAM, maka perusahaan Inggris masih akan terus dapat beroperasi dengan kekebalan hukum dalam situasi konflik dan HAM seperti yang telah dijelaskan pada laporan ini. *War on Want* percaya bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus bertanggungjawab atas aktivitas mereka di berbagai bagian dunia, dan menuntut pemerintah Inggris pada tingkat nasional untuk :

- Menerapkan hak ganti rugi yang efektif di Inggris untuk memungkinkan komunitas lokal mencari keadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Inggris di seluruh dunia
- Memperluas syarat pelaporan dalam Undang-undang Perusahaan (*Companies Act*) 2006 sehingga semua perusahaan Inggris yang bergerak di bidang pertambangan memiliki kewajiban untuk melaporkan dampak lingkungan dan sosial mereka <sup>180</sup>

Dalam kaitannya dengan laporan Profesor John Ruggie kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni 2008, *War on Want* menuntut pemerintah Inggris:

- Untuk mendorong pembuatan standar internasional yang mengikat tentang tanggungjawab perusahaan, termasuk mekanisme penyampaian keluhan yang efektif bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran HAM

Pada tingkat Uni Eropa, *War on Want* menuntut pemerintah untuk:

- Mendukung rekomendasi mengenai tanggungjawab perusahaan dalam laporan yang dibuat oleh Pelapor Parlemen Eropa tentang Corporate Social Responsibility, Richard Howitt MEP, diadopsi oleh Parlemen Eropa pada bulan Maret 2007 <sup>181</sup>

War on Want juga prihatin dengan kurangnya pengawasan dari parlemen terhadap operasi perusahaan-perusahaan Inggris. Dalam hal ini War on Want menuntut Komisi-komisi Khusus (Select Committees) di Majelis Rendah (House of Commons) - termasuk Komisi Pembangunan Internasional dan Komisi urusan Luar Negeri - untuk mengadakan penyelidikan tersendiri mengenai dampak operasi perusahaan-perusahaan pertambangan Inggris di seluruh dunia dan peran dukungan pemerintah Inggris terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Para pembaca diminta untuk mengungkapkan keprihatinan terhadap berbagai pelanggaran yang telah dijabarkan dalam laporan ini, serta menyerukan rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas, dengan menulis petisi kepada *Rt Hon David Miliband MP, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Foreign and Commonwealth Office, King Charles Street, London SWA 2AH.*

## Rujukan

1. Kerjasama internasional di persimpangan jalan: Bantuan, perdagangan dan keamanan di dunia yang tidak setara, UNDP Human Development Report, 2005; bab 5
2. L Clifford, 'Siapa Rio Tinto dan apa yang kita lakukan?', pidato pada Engineers' Breakfast, Tucson, Arizona, 10 November 2006
3. 'Hasil-hasil BHP Billiton untuk setengah tahun berakhir pada 31 Desember 2006', siaran pers BHP Billiton, 7 Februari 2007
4. 'Anglo American mengumumkan rekor pendapatan sebesar US\$5,5 milyar, naik 46%', siaran pers Anglo American, 21 Februari 2007
5. 'Catatan rekor dalam pendapatan, investasi dan dividen', siaran pers Rio Tinto, 1 Februari 2007
6. *Tambang: Biarkan masa jaya bergulir – Kajian kecenderungan global dalam industri pertambangan*, PricewaterhouseCoopers, Juni 2006
7. *Anglo American: Menjalankan sasaran strategis kita*, Laporan Tahunan Anglo American 2006; *Memasok Sumberdaya Penting*, Laporan Tahunan Rio Tinto 2006; 'Hasil-hasil BHP Billiton pada tahun yang berakhir pada 30 June 2006', siaran pers BHP Billiton, 23 Agustus 2006; *Laporan Tahunan Xstrata 2006*; *Vedanta Resources plc Laporan Tahunan 2007* (dimana '2006' berarti tahun pembukuan yang berakhir pada 31 Maret 2007, dst)
8. W Balane, 'Pemerintah diminta: Tetap menjadi pengatur, berhenti menjadi pendukung pertambangan', Minda News, 6 September 2006
9. 'Zambia: Kenaikan pajak mineral tidak memberi keuntungan bagi rakyat', IRIN news, 21 Februari 2007
10. *Pembangunan Ekonomi di Afrika: Memikirkan ulang peran investasi langsung asing (FDI)*, UNCTAD, 2005
11. Pada 1 Oktober 2007 Anglo American mengumumkan rencana mengurangi kepemilikan di AngloGold Ashanti dari 42% ke 17%, dan AngloGold Ashanti tidak lagi termasuk dalam kelompok Anglo American dalam laporan berikutnya; untuk informasi

tentang perusahaan selengkapnya, lihat *Anglo American: The Alternative Report*, War on Want, Agustus 2007

12. Untuk analisis mengenai dokumen rencana pemerintah Inggris yang terbuka untuk publik berkaitan dengan pentingnya mengamankan bahan mentah, lihat M Curtis, *Web of Deceit: Britain's real role in the world*, Vintage, 2003, chapters 9, 10 and passim; and M Curtis, *Unpeople: Britain's secret human rights abuses*, Vintage, 2004, bab 8

13. 'Afrika membuka diri bagi bisnis: Perdana Menteri memastikan dukungan Inggris bagi Investment Climate Facility (ICF) untuk Afrika', siaran pers DFID, 17 November 2005

14. 'Fasilitas investasi baru bagi Afrika adalah kunci menuju keberhasilan', siaran pers DFID, 1 Juni 2006; 'Anglo American mengumumkan investasi di Afrika', siaran pers Anglo American, 17 November 2005

15. Pada bulan Juli 2004, Gordon Brown dan Pemimpin Unilever Niall Fitzgerald telah membentuk *Business Contact Group* untuk memberi masukan dari sektor swasta kepada *Commission for Africa*, dengan anggota antara lain Anglo American, Rio Tinto dan De Beers serta Shell, Diageo dkk.; lihat *The Commission for Africa and corporate involvement*, CorporateWatch, June 2005

16. M Moody-Stuart, pernyataan pada konferensi BAA, 5-6 Juli 2005

17. "Sebenarnya, prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) mengakui hak-hak yang melekat pada masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya mereka serta menghormati otoritas sah yang mengharuskan pihak ketiga masuk kedalam hubungan dengan mereka yang setara dan saling menghormati berdasarkan prinsip persetujuan awal." *Kertas kerja pendahuluan tentang prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dalam kaitannya dengan pembangunan yang mempengaruhi tanah dan sumberdaya mereka...* dokumen PBB E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4, 8 Juli 2004; prinsip tersebut dikukuhkan melalui Deklarasi Hak Masyarakat Adat yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 September 2007

18. 'Posisi Inggris mengenai tanggapan Bank Dunia terhadap Kajian Industri Ekstraktif', DFID, 17 Agustus 2004; dengan penambahan tekanan

19. *Pembangunan Ekonomi di Afrika: Memikirkan ulang peran investasi langsung asing (FDI)*, UNCTAD, 2005

20. *ibid.*

21. M Peel and R Bream, 'Halangan untuk kelimpahan tembaga', *Financial Times*, 22 Desember 2006

22. 'Negara mendapat pajak US\$71 juta dari tembaga', *Times of Zambia*, 22 Februari 2007

23. Timbunan yang kaya: Siapa yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas?, *Christian Aid*, Januari 2007

24. *World Investment Report 2007: Korporasi Transnasional, Industri Ekstraktif dan Pembangunan*, UNCTAD, Oktober 2007; T Burgis and B Jopson, 'Kesepakatan pajak AngloGold di Tanzania', *Financial Times*, 30 September 2007; 'Apa yang ditambang adalah milikmu: Mendulang bagi si kaya dalam perpajakan', *The Economist*, 4 Oktober 2007

25. Perbandingan tingkat pajak efektif: *Industri pertambangan global 2005*, PricewaterhouseCoopers, Desember 2005

26. M Riesco, G Lagos and M Lima, Debat 'Bayar Pajakmu': *Perspektif tentang Pemajakan Korporasi dan Tanggungjawab Sosial dalam Industri Tambang di Chile*, UNRISD, Oktober 2005

27. Mencapai keseimbangan yang lebih baik: *Vol. I – World Bank Group and extractive industries*, World Bank, Desember 2003

28. Pertambangan di Filipina: Laporan perjalanan mencari fakta ke Filipina, Para pastor ordo Columban, 2007
29. 'Menambang di tambang terbuka yang disengketakan', IPS News, 9 September 2006
30. *Tambang: Biarkan masa jaya bergulir – Kajian kecenderungan global dalam industri pertambangan*, PricewaterhouseCoopers, Juni 2006
31. 'CEO AngloGold Ashanti yang baru mengatasi kematian di tambang', Reuters, 3 Agustus 2007; 'AngloGold menutup tambang; Pemogokan buruh tambang Afrika Selatan di depan mata', Reuters, 2 November 2007; R Moody, *Rocks and Hard Places: The Globalization of Mining*, Zed Books, Juni 2007
32. *Logam Kotor: tambang, masyarakat dan lingkungan*, Earthworks and Oxfam America, 2004
33. *Mencapai keseimbangan yang lebih baik: Vol. I – World Bank Group and extractive industries*, World Bank, Desember 2003
34. M Moody-Stuart, pidato dalam Rapat Umum Tahunan Anglo American, 25 April 2006
35. "Perekonomian yang tergantung produksi mineral kerap kali lebih rentan terhadap isu tata pemerintahan dan korupsi dibanding perekonomian yang tidak tergantung pada produksi mineral." Lihat bagian 'Mining and poverty reduction' di situs Bank Dunia: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)
36. Laporan Negara-negara yang Kurang Berkembang 2002, UNCTAD, 2002, dikutip dari Earthworks dan Oxfam America, *Logam Kotor: tambang, masyarakat dan lingkungan*, 2004
37. T Power, Menggali untuk pembangunan? *Kajian sejarah atas tambang dan pembangunan ekonomi*, Oxfam America, September 2002; laporan ini memuat gambaran umum dari studi akademik lanjutan Bank Dunia.
38. *Mencapai keseimbangan yang lebih baik: Vol. I – World Bank Group and extractive industries*, World Bank, Desember 2003
39. *Timbunan yang kaya: Siapa yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas?*, Christian Aid, Januari 2007
40. A Clapham and S Jerbi, 'Categories of Corporate Complicity in Human Rights Abuses', dalam *Hastings International and Comparative Law Journal*, vol 24, 2001, pp339-349; tiga tipologi ini telah diadopsi oleh Kantor Komisi Tinggi HAM PBB dalam kursus online tentang *Human Rights and Business*, yang berpendapat bahwa contoh keterlibatan langsung dibanding keterlibatan karena manfaat bisa mencakup kasus-kasus "dimana perusahaan menyediakan informasi, pendanaan atau peralatan kepada pemerintah yang ia tahu akan digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM"; lihat [www.unssc.org](http://www.unssc.org)
41. P Collier and I Bannon, *Sumberdaya alam dan konflik dengan kekerasan: pilihan dan aksi*, World Bank, 2003
42. P Collier, *Penyebab-penyebab ekonomi atas konflik sipil dan akibatnya terhadap kebijakan*, World Bank, 2000
43. Dikutip dari *Menggali keadilan: Menghitung biaya emas*, CAFOD, Mei 2006
44. *Mencapai keseimbangan yang lebih baik: Vol. I – World Bank Group and extractive industries*, World Bank, Desember 2003
45. *Penyebab-penyebab konflik di Afrika Sub-Sahara: Dokumen kerangka kerja*, DFID, Oktober 2001
46. *Laporan antar waktu dari Perwakilan Istimewa Sek-jen mengenai isu HAM dan korporasi internasional serta usaha-usaha bisnis lainnya*, UN document E/CN.4/2006/97, 22 Februari 2006
47. *Laporan Investasi Dunia 2007: Korporasi Transnasional, Industri Ekstraktif dan Pembangunan*, UNCTAD, Oktober 2007

48. P Harris, 'emas Kolombia memikat para penambang lagi', *Toronto Globe & Mail*, 4 Januari 2006
49. Bantuan militer Inggris ke Kolombia, *War on Want and Justice for Colombia*, 2004
50. C Pier, 'Perjanjian dengan iblis', *Baltimore Sun*, 2 April 2007; *The 'Sixth Division': Hubungan militer-paramiliter dan Kebijakan Amerika Serikat di Kolombia*, Human RightsWatch, September 2001
51. 'Dengan kemenangan yang merusak: Kolombia memprivatisasi industri mineral dengan dukungan Bank Dunia', pernyataan bersama serikat-serikat buruh Kolombia, 29 Oktober 2003
52. C Pier, 'Perjanjian dengan iblis', *Baltimore Sun*, 2 April 2007
53. 'Tentara menggusur lebih dari 2300 petani di Sur de Bolivar, Kolombia', pernyataan pers bersama Santa Rosa, 25 September 2006; 'Buruh tambang Kolombia menuntut keadilan setelah pembunuhan', *Ekklesia*, 29 September 2006
54. *Kolombia: Pembunuhan, penahanan semena-mena, dan ancaman pembunuhan – kenyataan serikat buruh di Kolombia*, Amnesty International, Juli 2007; 'Pimpinan masyarakat dibunuh oleh tentara Kolombia ketika sedang mencari ikan', *Human Rights First*, 9 November 2006
55. Dikutip di *Kolombia: Pembunuhan, penahanan semena-mena, dan ancaman pembunuhan*, seperti di atas
56. Tanggapan terhadap Tuduhan *War on Want's "Anglo American – The Alternative Report"*. *Anglo American*, 13 August 2007; tersedia di [www.waronwant.org](http://www.waronwant.org); *War on Want* bertemu dengan perwakilan *Anglo American* dan *AngloGold Ashanti*, 12 Oktober 2007
57. J Roberts and A Trounson, 'Penambang dituduh menggusur penduduk kota', *The Australian*, 3 Juli 2007; G Leech, 'Mengumpulkan kekuasaan dan kemiskinan', *Colombia Journal*, 11 November 2002
58. 'Colombia special', 24 February 2007, [www.minesandcommunities.org](http://www.minesandcommunities.org)
59. S MacNeil, 'Sintracarbon berpendapat', *Colombia Journal*, 19 Februari 2007
60. Lihat contohnya, A Chomsky and C Forster, 'Tambang batubara terbuka terbesar di dunia mengusir masyarakat hitam Afro-Kolombia dari tanah mereka', 9 Agustus 2006
61. 'Hasil-hasil BHP Billiton untuk paruh tahun berakhir pada 31 December 2006', pernyataan pers BHP Billiton, 7 Februari 2007
62. 'Hasil sementara Xstrata untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2006', pernyataan pers Xstrata, 6 Maret 2007
63. Menambang di Filipina: Laporan perjalanan pencarian fakta di Filipina, *Columban Fathers*, Januari 2007
64. Diam karena takut: Kekebalan hukum bagi pembunuhan ekstrajudisial di Filipina, *Human RightsWatch*, Juni 2007; Filipina: pembunuhan politik, HAM dan proses perdamaian, *Amnesty International*, Agustus 2006
65. *Menambang di Filipina: Laporan perjalanan pencarian fakta di Filipina*, *Columban Fathers*, Januari 2007; J Dela Cruz, 'Lima tahun di selokan bagi masyarakat adat', *Bulatlat*, Juli 2006
66. Laporan Pelapor khusus tentang situasi HAM dan kebebasan dasar bagi masyarakat adat...Misi ke Filipina, UN document E/CN.4/2003/90/Add.3, 5 Maret 2003
67. A Estabillo, 'Australia akan meningkatkan bantuan untuk Republik Filipina', *MindaNews*, 20 Juli 2006
68. 'Anglo American mencari ijin menambang di Filipina', *Creamer Media's Engineering News*, 27 Januari 2007
69. B Serrano, 'Aktivis hak masyarakat adat dibunuh', *Philippine Star*, 6 September 2006
70. 'Keuskupan Cot Selatan: Tetap menolak tambang', *MindaNews*, 23 Januari 2007
71. Lihat Kampanye Macambol di [www.macambol.org](http://www.macambol.org)

72. 'Kawasan Gunung Hamiguitan, Teluk Pujada: Di jurang kehancuran?' Tan-awan, 22 Januari 2007
73. 'Masyarakat setempat menolak aktivitas tambang nikel BHP Billiton di Teluk Pujada', Mineral Policy Institute, 24 November 2005
74. N Mathiason, 'Tuduhan baru menodai tahun keberhasilan Anglo', *Observer*, 22 April 2007
75. Sebelumnya masyarakat Buaya telah memberi persetujuan untuk melanjutkan eksplorasi namun kemudian menarik kembali persetujuan tersebut sebab konsultasi yang dilakukan tidak memberi informasi yang semestinya tentang dampak pertambangan di wilayah mereka; lihat 'Suku Buaya dari Kalinga membatalkan persetujuan sebelumnya dan kini siap menentang permohonan ijin eksplorasi CEXCI', Cordillera Peoples Alliance, 17 September 2005
76. 'Perjuangan melawan tambang yang merusak meningkat di Apayao', Cordillera Peoples Alliance, 13 Oktober 2006
77. *MOA And Offtake Agreement Signed For Romblon Nickel Project, Philippines*, siaran pers Pelican Resources Limited, 21 September 2007
78. M Ramos and T Burgonio, 'Aktivis anti-tambang ditembak mati oleh penjaga keamanan', *Philippine Daily Inquirer*, 5 Oktober 2007; J Aning, 'Eksekutif perusahaan tambang menjelaskan pembunuhan', *Philippine Daily Inquirer*, 6 Oktober 2007
79. 'About Central China Goldfields plc', [www.ccgoldfields.com](http://www.ccgoldfields.com)
80. 'Directors', [www.ccgoldfields.com](http://www.ccgoldfields.com)
81. S Shah, 'Oxus membuka tambang emas di Uzbekistan', *Independent*, 20 September 2004; 'Hasil produksi Oxus gold plc di Uzbekistan mencapai 500.000 ounce pada 2008', 22 September 2004, [www.uzbekembassy.org](http://www.uzbekembassy.org)
82. *Mitos dan Realitas: Sebuah Analisis tentang pemerintah Uzbek government 30 Juni 2006 Aide-Memoire*, Human Rights Watch, Oktober 2006
83. 'Pertemuan dewan industri dan perdagangan Uzbek-British di Tashkent', 27 April 2006, [www.uzbekembassy.org](http://www.uzbekembassy.org)
84. S Shah, 'Inggris: Serangan Presiden Kyrgyzstan membuat saham Oxus anjlok', *Independent*, 4 Februari 2006
85. Kyrgyzstan country profile, [www.fco.gov.uk](http://www.fco.gov.uk)
86. C Murray, *Pembunuhan di Samarkand*, Mainstream, 2007
87. Asia Energy, Laporan Tahunan 2005, [www.asia-energy.com](http://www.asia-energy.com)
88. 'Pemerintah mempertimbangkan negosiasi kembali dengan Asia Energy setelah kebijakan tentang batubara dituntaskan', *New Age* (Bangladesh), 5 Oktober 2007; 'Kebijakan batubara yang kontroversial harus dikaji kembali sebelum disetujui', *New Age*, 18 Februari 2007
89. S Khan, 'Tambang batubara Phulbari: rencana AEC membutuhkan pengusuran 50.000 orang', *Daily Star* (Bangladesh), 8 Juli 2005
90. 'Ribuan orang memprotes "tambang terbuka" batubara di Phulkbari', *Daily Star*, 26 September 2005
91. Asia Energy, 'Phulbari project', [www.asia-energy.com](http://www.asia-energy.com)
92. 'Ribuan orang memprotes "tambang terbuka" batubara di Phulkbari', *Daily Star*, 26 September 2005
93. R Moody, 'Bangla Nagar: 26 Agustus, 2006', 28 Agustus 2006, [www.minesandcommunities.org](http://www.minesandcommunities.org); J Doward and M Haider, 'Kematian misterius, kota yang bergolak dan perjanjian 1 milyar dolar', *Observer*, 3 September 2006
94. 'Disinvestasi dari Monterrico Metals', Netwerk Vlaanderen, 23 Maret 2006; 'Satu tewas dalam konflik tambang baru di Peru', Oxfam America, 5 Agustus 2005

95. 'Pergolakan di Andes', *The Economist*, 20 September 2007
96. 'Protes tembaga Peru memanas kembali', Reuters, 8 Agustus 2005; 'Air di balik konflik mematikan di lokasi tambang Monterrico Peru', Environmental News Service, 9 Agustus 2005; 'Petani Peru melancarkan demonstrasi baru terhadap Rio Blanco', Reuters, 30 September 2005
97. 'Dossier project Rio Blanco, Minera Majaz, Monterrico Metals', Catapa, 2 April 2007; 'Minera Majaz tidak berbicara yang sesungguhnya', Muqui Network, 22 Januari 2007; *Mining and development in Peru*, Peru Support Group, Maret 2007
98. 'Air di balik konflik mematikan di lokasi tambang Monterrico Peru', Environmental News Service, 9 Agustus 2005
99. 'Oxfam America memprotes ancaman pembunuhan terhadap pembela hal di Peru', Oxfam America, 22 Maret 2007; 'Dossier project Rio Blanco, Minera Majaz, Monterrico Metals', Catapa, 2 April 2007
100. 'Disinvestasi dari Monterrico Metals', Netwerk Vlaanderen, 23 Maret 2006; 'London Calling berseteru dengan DFID... dan sebuah buket bunga untuk Rio Tinto', Nostromo Research, 22 Maret 2006
101. 'Dossier project Rio Blanco, Minera Majaz, Monterrico Metals', Catapa, 2 April 2007
102. *Tambang dan pembangunan di Peru*, Peru Support Group, Maret 2007
103. 'Dutabesar Inggris untuk Peru menjamin perlindungan lingkungan di proyek tambang Rio Blanco', *La Hora*, 11 November 2005
104. J Finch and J Treanor, 'Meningkatnya pembayaran untuk anggota dewan perusahaan di Inggris terungkap', *Guardian*, 2 Oktober 2006
105. B Witte, 'Studi lingkungan Xstrata Chilena hydro tidak memadai insufficient', *Santiago Times*, 25 Maret 2007; B Witte, 'Kampanye anti dam Chile meningkat', *Santiago Times*, 20 Maret 2007
106. 'Hasil sementara Xstrata untuk tahun berakhir 31 Desember 2006', Xstrata news release, 6 Maret 2007
107. 'Tuntutan hukum untuk menghentikan penggunaan jalur pipa mineral Alumbreira', *Primera Fuente*, 22 Maret 2007
108. 'Badan Pemeriksa Keuangan Argentina menganggap pengawasan aktivitas tambang di Catamarca "tidak memadai"', *Diario El Ancasti*, 20 Maret 2006
109. 'Perebutan untuk emas: Polisi meringkus dengan kekerasan demonstrasi damai pada konferensi internasional tentang tambang di kawasan Andes Argentina', Centre for Human Rights and Environment, 4 Oktober 2006
110. 'Deklarasi Andalgalá', 14 Agustus 2005
111. 'Corporate and social responsibility', [www.vedantaresources.com](http://www.vedantaresources.com)
112. 'Niyamgiri berseru – dari "Gunung hukum"', 5 Mei 2006, [www.minesandcommunities.org](http://www.minesandcommunities.org)
113. M Dummett, 'Pertarungan untuk Kilang Baja India', BBC News Online, 22 Februari 2006
114. *Laporan dalam IA No 1324 mengenai pabrik penyulingan alumina yang dibangun oleh M/s Vedanta Alumina Limited di Lanjigarh di Distrik Kalahandi, Orissa*, Central Empowered Committee, 21 September 2005
115. *Vedanta Peduli?, Memecahkan mitos tentang operasi Vedantadi Lanjigarh, India*, ActionAid, 2007; F Padel and S Das, *Antropologi Genosida: Gerakan suku-suku di India Tengah melawan over-industrialisation*, makalah untuk South Asia Anthropologists' Group, Goldsmiths College, London, Juli 2006



116. Laporan dalam IA No 1324 mengenai pabrik penyulingan alumina yang dibangun oleh M/s Vedanta Alumina Limited di Lanjigarh di Distrik Kalahandi, Orissa, Central Empowered Committee, 21 September 2005
117. Tanggapan Vedanta kepada ActionAid, 30 Juli 2007
118. Laporan dalam IA No 1324 mengenai pabrik penyulingan alumina yang dibangun oleh M/s Vedanta Alumina Limited di Lanjigarh di Distrik Kalahandi, Orissa, Central Empowered Committee, 21 September 2005
119. 'Mahkamah Agung menentukan persyaratan bagi tambang Vedanta Mine', Reuters, 26 October 2007
120. Perusakan di seluruh India: Laporan Balasan tentang Vedanta Resources plc 2005, Nostromo Research and India Resource Centre, 2005
121. C Alvares and S Devotta, Laporan Kunjungan Sub-komite SCMCKe Tamil Nadu during pada 17-18 Juli, 2005, Tuticorin, 17 Juli 2005; Menunjukkan Catatan Peringatan kepada Industri Sterlite, Tuticorin, Supreme Court Monitoring Committee on HazardousWastes, New Delhi, 2 Mei 2005
122. 'Vedanta diminta untuk menghentikan pembangunan', *The Hindu*, 11 Maret 2007
123. Perusakan di seluruh India: Laporan Balasan tentang Vedanta Resources plc Counter Report 2005, Nostromo Research and India Resource Centre, 2005
124. J Range, 'Buruh tambang Zambia membayar mahal untuk lonjakan tembaga', Dow Jones newswire, 12 Oktober 2005
125. *Undermining Development? Penambangan tembaga di Zambia*, ACTSA, Christian Aid and SCIAF, Oktober 2007
126. 'Kelalaian KCM penyebab polusi sungai Kafue', *Times of Zambia*, 15 November 2006; 'Tambang tembaga Konkola mencemari sungai Kafue', *Times of Zambia*, 8 November 2006
127. A Fraser and J Lungu, *Rejeki nomplok untuk siapa? Pemenang dan pecundang dalam privatisasi tambang tembaga Zambia*, CCJDP and CSTNZ, Lusaka, Januari 2007
128. J Helmer, 'Armenia akan memulai penuntutan tambang emas Zod yang dikendalikan Vedanta', *Mineweb*, 28 Februari 2007; 'Perusahaan emas India menghadapi ketidakpastian masa depan di Armenia', 16 Februari 2007; 'London Calling membongkar kesepakatan yang mencurigakan', Nostromo Research, 24 Juni 2006
129. *Anglo American: Menjalankan sasaran strategis kita* Anglo American Annual Report 2006; informasi mengenai perusahaan secara menyeluruh dapat dilihat di *Anglo American: The Alternative Report*, War onWant, Agustus 2007
130. *Suatu Iklim Perubahan*, Laporan Anglo American kepada Masyarakat 2006
131. *Banjir emas: Dampak tambang emas bagi rakyat miskin di Obuasi, Ghana*, ActionAid, Oktober 2006
132. 'Ghana: Kampanye untuk menghentikan kekerasan dalam pertambangan', pernyataan pers the National Coalition on Mining, Accra, Ghana, 4 Mei 2006
133. Pernyataan oleh Mary Robinson tentang isu HAM di sektor pertambangan Ghana, 22 November 2006; lihat website dari the Ethical Globalization Institute: [www.realizingrights.org](http://www.realizingrights.org)
134. *Harta tersembunyi? Mencari pemasukan dari tambang emas Mali*, Oxfam America, Februari 2007
135. *Tambang emas dan HAM di Mali*, International Federation of Human Rights, Februari 2007
136. *Pengaruh Socio-ekonomi tambang emas di Mali: Suatu penelitian tentang operasi tambang Sadiola dan Morila*, Chr. Michelsen Institute, Bergen, 2006

137. *Kutukan Emas:Republik Demokrasi Kongo*, Human RightsWatch, Juni 2005; 'Laporan Human RightsWatch Report tentang aktivitas AngloGold Ashanti di Republik Demokrasi Kongo', pernyataan pers AngloGold Ashanti, 1 Juni 2005; 'AngloGold Ashanti mengkaji ulang aktivitas eksplorasi di Republik Demokrasi Kongo', pernyataan pers AngloGold Ashanti, 21 Juni 2005
138. *Laporan antar waktu dari Kelompok Ahli tentang Republik Demokrasi Kongo*, yang mengacu kepada *Resolusi Dewan Keamanan PBB 1698 (2006)*. Dokumen PBB S/2007/40, 31 Januari 2007
139. *Sebuah Iklim Perubahan*, Laporan Anglo American Report untuk Masyarakat 2006
140. *Rustenburg Platinum Research Study: Suatu kajian program tanggungjawab perusahaan dari industri tambang platinum di provinsi Barat Daya dari Afrika Selatan, NorthWest Province of South Africa*, Bench Marks, South Africa, Juni 2007
141. R Morris, 'Polisi menembaki demonstran platinum', *Business Report (South Africa)*, 12 Juni 2006; R Moody, 'Jumat Kelabu di pojok Senin', Nostromo Research, 25 Juni 2006; untuk laporan Anglo Platinum mengenai kejadian tersebut, lihat 'tuduhan Richard Spoor tidak tepat, kemungkinan merusak nama baik dan sebelah pihak', *Business Report*, 15 Juni 2006
142. Surat terbuka Richard Spoor kepada Sir Mark Moody-Stuart, 25 Februari 2007, dimuat kembali pada [www.minesandcommunities.org](http://www.minesandcommunities.org); lihat juga E Momborg, 'Perusahaan tambang, masyarakat dalam sengketa mengenai ganti rugi penggusuran', *Sunday Independent (South Africa)*, 28 Januari 2007
143. 'Masyarakat Limpopo terus mendesak walaupun banyak polisi menjaga, menunjukkan pembangkangan mereka terhadap Anglo-Platinum', pernyataan pers Jubilee South Africa, 28 November 2006
144. 'Jubilee SA marah atas pemukulan dan penahanan demonstran oleh polisi di tambang Anglo Platinum di Twickenham', pernyataan pers Jubilee South Africa, 4 Januari 2007
145. 'Masyarakat Magobading di provinsi Limpopo menghambat jalan menuju Hackney di tambang Twickenham mine', pernyataan pers Jubilee South Africa, 4 Januari 2007; Richard Spoor, 'Re: Anglo-American Platinum Corporation Ltd dan dua lainnya: Larangan yang mengancam', surat kepada Brink Cohen le Roux, 10 Juli 2006, disalin dan dimuat kembali di [www.minesandcommunities.org](http://www.minesandcommunities.org)
146. L Clifford, 'Siapa Rio Tinto dan apa yang kami lakukan?', pidato pada *Engineers' Breakfast*, Tucson, Arizona, 10 November 2006
147. 'Catatan rekor dalam pendapatan, investasi dan dividen', pernyataan pers Rio Tinto, 1 Februari 2007
148. L Clifford, 'Tambang – apa yang telah berubah dan apa yang akan berubah?' Kuliah Tahunan Pertama Lacy, University of Arizona, 10 November 2006
149. *Menyepelkan tambang Indonesia: Dampak sosial dan lingkungan yang buruk dari operasi tambang Rio Tinto di Indonesia*, Walhi, Jakarta, 2003
150. J Perlez and R Bonner, 'Di bawah gunung kekayaan, sungai sampah', *NewYork Times*, 27 Desember 2005; *Membayar untuk Perlindungan Keamanan: tambang Freeport dan pasukan keamanan Indonesia*, Global Witness, Juli 2005
151. 'Tigapuluh sembilan tahun Freeport-Rio Tinto cukuplah sudah', Laporan oleh United Front for the struggle of West Papuan people, 27 Februari 2006
152. *Terlalu mahal harganya: biaya HAM dalam aktivitas militer Indonesia*, Human RightsWatch, Juni 2006
153. 'Larang pembuangan tambang yang beracun, surat terbuka mendesak sektor pertambangan Australia', Oxfam Australia, 12 Februari 2007; 'NY City Comptroller meminta studi lingkungan Freeport', Planet Ark US, 6 Desember 2006

154. *Dampak lingkungan operasi tambang tembaga dan emas Freeport-Rio Tinto di Papua*, Walhi, Jakarta, 2006; lihat pula 'Kegagalan industri tambang Indonesia', JATAM, 13 Januari 2006
155. *Menyepelkan tambang Indonesia: Dampak sosial dan lingkungan yang buruk dari operasi tambang Rio Tinto di Indonesia*, Walhi, Jakarta, 2003
156. Kata sambutan pada *Dampak lingkungan operasi tambang tembaga dan emas Freeport-Rio Tinto di Papua*, Walhi, Jakarta, 2006
157. 'Catatan rekor dalam pendapatan, investasi dan dividen', pernyataan pers Rio Tinto, 1 Februari 2007
158. *Rio Tinto: mengkaji kembali prinsip-prinsip*, Ecumenical Council for Corporate Responsibility, April 2006
159. *Penutupan tambang emas Kelian dan peran the Business Partnership for Development/World Bank, Forest Peoples Programme*, April 2003; *Menyepelkan tambang Indonesia: Dampak sosial dan lingkungan yang buruk dari operasi tambang Rio Tinto di Indonesia*, Walhi, Jakarta, 2003
160. 'Kelian', 1 Desember 2004, [www.riotinto.com](http://www.riotinto.com); 'Record growth in earnings, investment and dividend', pernyataan pers Rio Tinto, 1 Februari 2007
161. J Atwood, 'Tambang akan dimulai lagi di Bougainville?' Dow Jones newswires, 6 Desember 2006; 'MRA ingin melihat rencana pengoperasian kembali tambang di Bougainville', *The National*, 29 Mei 2007
162. 'Rapat Umum Tahunan BHP Billiton Limited', 29 November 2006
163. 'Hasil-hasil BHP Billiton pada paruh tahun berakhir pada 31 Desember 2006', pernyataan pers BHP Billiton, 7 Februari 2007
164. 'Rapat Umum Tahunan BHP Billiton Limited', 29 November 2006
165. 'Penduduk desa PNG menuntut BHP, penambang Ok Tedi', *Sydney Morning Herald*, 19 Januari 2007
166. 'Muncul celah pada tabir tentang keluarnya BHP dari bencana tambang Ok Tedi', Mineral Policy Institute, 22 Januari 2007; 'Ok Tedi Sustainable Development Program', [www.bhp.billiton.com](http://www.bhp.billiton.com)
167. 'BHP: diam-diam penipu', bahan bacaan untuk media dari Mineral Policy Institute, 11 November 2003
168. *Masukan bagi Perwakilan Khusus PBB untuk HAM dan korporasi transnasional serta usaha bisnis lainnya*, Forest Peoples Programme and Tebtebba Foundation, 29 Desember 2006
169. R Goodland, *Pelacakan Lingkungan dan Sosial Suriname: Proyek Tambang Bauksit Bakhuis*, Association of Indigenous Village Leaders in Suriname (VIDS) and North-South Institute, Canada, 2006
170. 'Hasil-hasil BHP Billiton untuk paruh tahun berakhir dengan 31 Desember 2006', pernyataan pers BHP Billiton, 7 Februari 2007; 'Catatan rekor dalam pendapatan, investasi dan dividen', pernyataan pers Rio Tinto, 1 Februari 2007
171. M Hawthorne, 'Chipe pergi ke Chile tetapi tidak dapat menambang', *The Age* (Australia), 27 Maret 2007; H Fazio, 'Pekerja Chile menuntut keuntungan tambang', *IRC Americas*, 14 September 2006
172. A Townsend and M Hollingsworth, 'Pengacara menuntut BHP Billiton atas keracunan yang mematikan', *Independent on Sunday*, 26 November 2006; 'Manganism – keburukan tersembunyi Samancor', SA Mining, April 2006; 'Mantan buruh Samancor kedua akan dikuburkan dalam dua minggu mendatang', University of KwaZulu Natal, Januari 2005; *Ruang-ruang beracun: menciptakan kekayaan, menghasilkan kemiskinan*, Groundwork, Pietermaritzburg, 2006

173. 'Hasil-hasil BHP Billiton dalam paruh tahun berakhir pada 31 Desember 2006', pernyataan pers BHP Billiton, 7 Februari 2007; 'Anglo American mengumumkan pemasukan rekor sebesar US\$5,5 miliar, naik 46%', pernyataan pers Anglo American, 21 Februari 2007
174. 'Billiton tidak akan mencari kontrak pertambangan', *The Hindu*, 26 Maret 2007; 'Tim SC menolak tambang di dua kawasan di Orissa', 12 Januari 2005, [www.minesandcommunities.org](http://www.minesandcommunities.org)
175. *DFID dan tanggungjawab sosial perusahaan*, DFID, 2003
176. *Bisnis dan HAM: Memetakan Standar Internasional untuk Tanggung-jawab dan Tanggung-gugat bagi Undang-undang Perusahaan*, Laporan Perwakilan Khusus kepada Sekjen mengenai isu HAM dan korporasi internasional serta usaha-usaha bisnis lainnya, , dokumen PBB A/HRC/4/035, 9 Februari 2007
177. D Doane and A Holder, *Mengapa tanggung-jawab sosial perusahaan mengecewakan anak-anak*, Save the Children and CORE, 2007; menurut laporan ini, pemerintah Jerman telah meminta penerapan regulasi yang mengikat dimasukkan ke dalam EITI sebagai pengakuan atas kegagalan pendekatan sukarela. Lihat pula *Eye on EITI: Perspektif Masyarakat Sipil dan Rekomendasi untuk Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif*, Publish What You Pay and RevenueWatch Institute, Oktober 2006
178. P Davis, 'Prinsip-prinsip Kesukarelaan tentang Keamanan dan HAM – Jeda yang tidak mudah, untuk saat ini', *Ethical Corporation*, 9 July 2007; *Minyak dan tambang di tempat-tempat yang penuh kekerasan: Mengapa kode etik kesukarelaan bagi perusahaan tidak menjamin HAM*, Global Witness, Oktober 2007
179. P Skinner, 'Pembangunan yang berkelanjutan dalam bisnis pertambangan', London Business School Stockton Lecture, 24 Oktober 2006; M Moody-Stuart, pidato pada Pertemuan Tahunan Anglo American, 25 April 2006
180. Untuk saat ini, hanya perusahaan yang mendapat 'kuota' yang tercatat di London Stock Exchange dst yang harus memenuhi persyaratan pelaporan Business Review seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perusahaan; lihat *Act Now! Panduan untuk pengkampanye tentang Undang-undang Perusahaan*, CORE dan Trade Justice Movement, September 2007
181. R Howitt, *Laporan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan: suatu kemitraan baru*, dokumen EU A6-0471/2006, 20 Desember 2006

Diterbitkan pada bulan November 2007  
Penulisan dan penelitian untuk War on Want dilakukan oleh Mark Curtis

War on Want  
Development House  
56-64 Leonard Street  
London EC2A 4LT  
Tel: +44 (0)20 7549 0555  
Fax: +44 (0)20 7549 0556  
E-mail: [mailroom@waronwant.org](mailto:mailroom@waronwant.org)  
[www.waronwant.org](http://www.waronwant.org)

Dicetak pada kertas daur ulang  
Company limited by guarantee Reg. No. 629916. Charity No. 208724

War on Want

War on Want memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang dengan cara kemitraan dan menggalang solidaritas bersama masyarakat yang terkena dampak globalisasi. Kami melakukan kampanye untuk hak-hak pekerja dan melawan akar penyebab kemiskinan global, ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

Foto latar depan: Pasukan Filipina meninggalkan Mindanao, September 2007

Laporan ini dihasilkan berkat dukungan dana Uni Eropa. Isi laporan ini merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari War onWant

Penerjemah: Ima Susilowati; Korektor: Adriana Sri Adhiati untuk Down to Earth –  
Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan di Indonesia  
<http://dte.gn.apc.org>